



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 23/PR.01.3-BA/61/3.1/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 tanggal 27 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi uraian:

- a. visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024.

- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman:
- penyusunan Rencana Strategis unit eselon II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
  - penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
  - penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dan pemangku kepentingan lainnya;
  - integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; dan
  - penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 16/PR.01.3-Kpt/06/Prov/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM



Eka Sulastri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2020 – 2024

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2022**

[jdih.kpu.go.id/kalbar](http://jdih.kpu.go.id/kalbar)

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.



Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini sejalan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan menyesuaikan mekanisme penyusunan Rencana Strategis sebagaimana diatur Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, untuk memberikan arah kebijakan dan program sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi, serta menjadi arahan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan pimpinan dan semua pegawai KPU Provinsi Kalimantan Barat terlibat untuk melaksanakannya secara akuntabel, profesional, dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun dan membuat Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 27 Juni 2022

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Barat**



**Ramdan**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. KONDISI UMUM .....</b>	<b>1</b>
A.1. Kondisi /Struktur Geografis/Wilayah Provinsi Kalimantan Barat .....	1
A.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi / Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Barat .....	6
A.3. Sejarah Terbentuknya Satuan Kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat.....	30
A.4. Perkembangan Struktur Kepemimpinan dan Pencapaian Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat .....	31
A.5. Aspirasi Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Barat.....	47
<b>B. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024 .....</b>	<b>50</b>
B.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Provinsi Kalimantan Barat .....	50
B.2. Potensi dan Permasalahan KPU Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024.....	54
B.3. Peluang yang akan dihadapi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan Renstra Periode 2020-2024 .....	56
B.4. Tantangan/Ancaman yang akan dihadapi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan Renstra Periode 2020-2024 .....	56
B.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT .....	57
<b>BAB 2</b>	
<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024.....</b>	<b>70</b>
<b>A. VISI KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....</b>	<b>71</b>
<b>B. MISI KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....</b>	<b>72</b>
<b>C. TUJUAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....</b>	<b>72</b>
<b>D. SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....</b>	<b>73</b>

### **BAB 3**

<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024 .....</b>	<b>74</b>
--	-----------

<b>A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU .....</b>	<b>74</b>
<b>B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....</b>	<b>78</b>
<b>C. KERANGKA REGULASI KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....</b>	<b>80</b>
<b>D. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....</b>	<b>80</b>

### **BAB 4**

<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024 .....</b>	<b>82</b>
--	-----------

<b>C. TARGET KINERJA KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....</b>	<b>82</b>
<b>D. KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....</b>	<b>92</b>

### **BAB 5**

<b>PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
----------------------	-----------

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kalimantan Barat .....	4
Tabel 2.	Jumlah Penduduk di Kalimantan Barat Tahun 2020 .....	4
Tabel 3.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	5
Tabel 4.	Daftar Gubernur Kalimantan Barat dari Masa ke Masa .....	7
Tabel 5.	Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur .....	9
Tabel 6.	Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur ...	10
Tabel 7.	Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 .....	11
Tabel 8.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden .....	13
Tabel 9.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden .....	14
Tabel 10.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Berdasarkan Partai Politik Tahun 2004 .....	15
Tabel 11.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2004 .....	15
Tabel 12.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 .....	16
Tabel 13.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 .....	17
Tabel 14.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan Partai Politik Tahun 2009 .....	18
Tabel 15.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2009 .....	19
Tabel 16.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 .....	20
Tabel 17.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Tahun 2014 .....	21
Tabel 18.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2014 .....	22
Tabel 19.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum .....	23
Tabel 20.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 .....	24
Tabel 21.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 .....	25
Tabel 22.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Daerah Pemilihan 1 Tahun 2019 .....	26
Tabel 23.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Daerah Pemilihan 2 Tahun 2019 .....	27
Tabel 24.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2019 .....	27

Tabel 25. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.	28
Tabel 26. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat.....	29
Tabel 27. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2003-2008 .....	31
Tabel 28. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2008-2013 .....	32
Tabel 29. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018 .....	32
Tabel 30. Perubahan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018 ..	32
Tabel 31. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 .....	33
Tabel 32. Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 -2023 .....	33
Tabel 33. Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 -2023 .....	33
Tabel 34. Perubahan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 ..	34
Tabel 35. Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023 .....	34
Tabel 36. Perubahan Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023 .....	34
Tabel 37. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.....	35
Tabel 38. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 .....	36
Tabel 39. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 2 .....	36
Tabel 40. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 3 .....	37
Tabel 41. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 4 .....	38
Tabel 42. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 .....	38
Tabel 43. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 .....	38
Tabel 44. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 .....	39
Tabel 45. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 8 .....	39
Tabel 46. Persentase Partisipasi Pemilih di Provinsi Kalimantan Barat Pemilu Tahun 2019.....	40
Tabel 47. Persentase Partisipasi Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 .....	41
Tabel 48. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019.....	42
Tabel 49. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Provinsi Kalimantan Barat .....	58
Tabel 50. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Kalimantan Barat .....	60
Tabel 51. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Kalimantan Barat .....	62
Tabel 52. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Provinsi Kalimantan Barat .....	64
Tabel 53. Sintesa Strategi KPU Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024.....	66
Tabel 54. Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2024.....	82
Tabel 55. Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 .....	84

Tabel 56. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2024.....	85
Tabel 57. Kerangka Pendanaan Program Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 .....	93

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Penduduk di Kalimantan Barat Tahun 2020 .....	5
Grafik 2. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	6
Grafik 3. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.....	9
Grafik 4. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.....	11
Grafik 5. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.....	12
Grafik 6. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2004.....	13
Grafik 7. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden .....	14
Grafik 8. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.....	17
Grafik 9. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.....	20
Grafik 10. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.....	25
Grafik 11. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan .....	36
Grafik 12. Persentase Partisipasi Pemilih di Provinsi Kalimantan Barat Pemilu Tahun 2019.....	40
Grafik 13. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 ..	41

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.....	1
Gambar 2. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.....	35
Gambar 3. Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat Jalan Subarkah No. 1 Pontianak ...	50
Gambar 4. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU).....	76
Gambar 5. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Renstra KPU Tahun 2020-2024.....	77
Gambar 6. Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) Tahun 2020-2024 .....	78
Gambar 7. Struktur Organisasi KPU Provinsi Tipe B .....	81

# BAB I

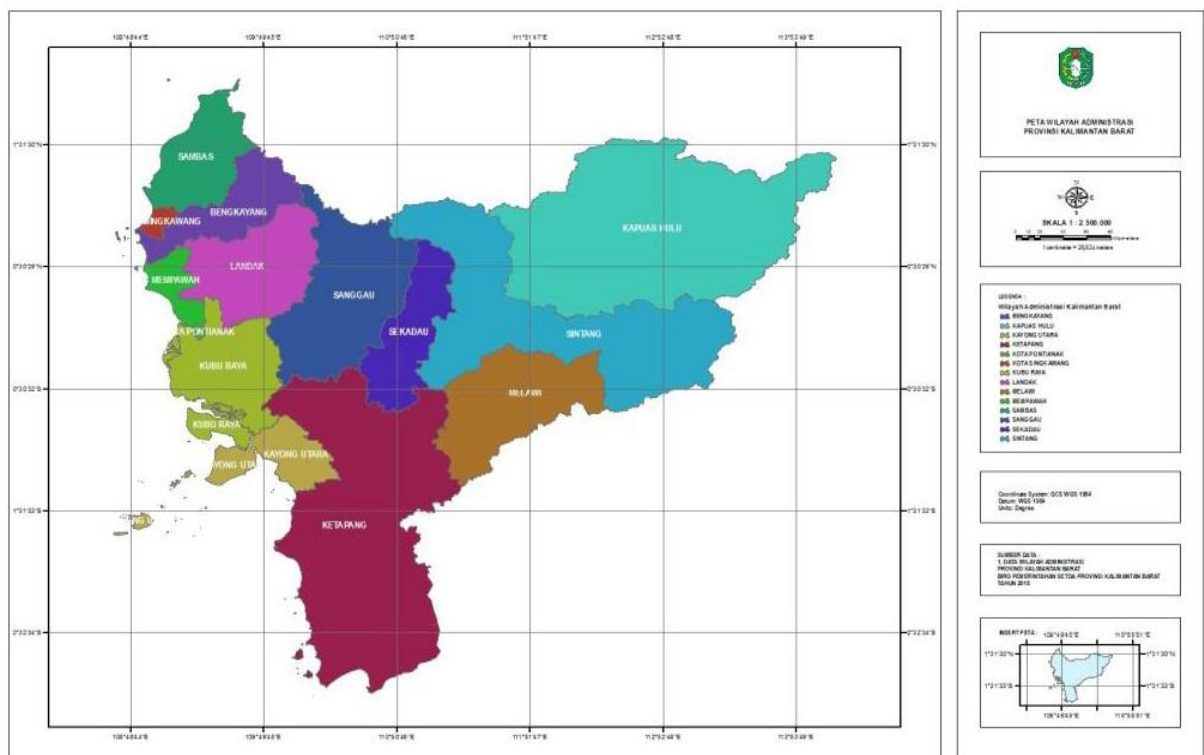
## PENDAHULUAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis sebuah lembaga yang mencakup suatu wilayah, tentunya perlu mempertimbangkan kondisi umum yang erat kaitannya dengan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis tersebut. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menyusun Rencana Strategis 2020-2024 dengan berdasarkan pada data yang diperoleh dari beberapa Instansi. Rencana Strategis itu sendiri pada umumnya membahas tentang kondisi umum dari Provinsi Kalimantan Barat dan terkait pemilihan yang telah berlangsung selama ini di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, Rencana Strategis 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra KPU Tahun 2020-2024.

## A. KONDISI UMUM

### A.1. Kondisi /Struktur Geografis/Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

### Gambar 1. Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Barat



**Sumber: PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

Bersumber dari data Pemerintah Daerah (<https://kalbarprov.go.id/page/geografis>) bahwa Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 LU serta 3°05 LS serta di antara 108°0 BT dan 114°10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

Utara	:	Sarawak (Malaysia)
Selatan	:	Laut Jawa & Kalimantan Tengah
Timur	:	Kalimantan Timur
Barat	:	Laut Natuna dan Selat Karimata

Sebelah utara Kalimantan Barat terdapat 4 (empat) Kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran yaitu; Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang - Kapuas Hulu.

Luas wilayah Kalimantan Barat sekitar 146.807 km<sup>2</sup> atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar keempat setelah pertama Irian Jaya (421.891 km<sup>2</sup>), kedua Kalimantan Timur (202.440 km<sup>2</sup>) dan ketiga Kalimantan Tengah (152.600 km<sup>2</sup>). Dilihat dari luas menurut Kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (35.809 km<sup>2</sup> atau 24,39 persen) kemudian diikuti Kapuas Hulu (29.842 km<sup>2</sup> atau 20,33 persen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km<sup>2</sup> atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya.

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan daratan rendah, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Sungai Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata, sepanjang daerah daratan berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan diapit oleh Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di bagian Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan

sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama adalah S. Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), yang mana sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya adalah: S. Melawi, (dapat dilayari 471 km), S. Pawan (197 km), S. Kendawangan (128 km), S. Jelai (135 km), S. Sekadai (117 km), S. Sambas (233 km), S. Landak (178 km).

Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau. Dari danau-danau yang ada hanya dua yang cukup berarti. Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.

Dipengaruhi oleh dataran rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung relatif rendah serta non aktif. Gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Serawai, Kab. Sintang yang mempunyai ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut, jauh lebih rendah dibanding G. Semeru (Jatim, 3.676 meter) atau G. Kerinci (Jambi, 3.805 meter).

Gunung Lawit yang berlokasi di Kapuas Hulu, Kec. Embaloh Hulu dan lebih dahulu dikenal di Kalimantan Barat, ternyata hanya menempati tertinggi ketiga karena mempunyai tinggi 1.767 meter, sedangkan tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung (Kec. Ambalau) dengan ketinggian mencapai 1.770 meter.

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut, akan tetapi Kalbar memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Riau, Sumatera.

Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kab. Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di Kab. Pontianak.

Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kab. Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 Kabupaten, 2 Kota, 174 Kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 Desa.

**Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kalimantan Barat**

No.	Kabupaten/Kota	Kec.	Kel.	Desa
1	Kab. Sambas	19	-	193
2	Kab. Mempawah	9	7	60
3	Kab. Sanggau	15	6	163
4	Kab. Ketapang	20	9	253
5	Kab. Sintang	14	16	390
6	Kab. Kapuas Hulu	23	4	278
7	Kab. Bengkayang	17	2	122
8	Kab. Landak	13	-	156
9	Kab. Sekadau	7	-	87
10	Kab. Melawi	11	-	169
11	Kab. Kayong Utara	6	-	43
12	Kab. Kubu Raya	9	-	117
13	Kota Pontianak	6	29	-
14	Kota Singkawang	5	26	-
15	<b>Kalimantan Barat</b>	<b>174</b>	<b>99</b>	<b>2.031</b>

Sumber: Permendagri Nomor 137 Tahun 2017

Berdasarkan data agregat kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/data/data-agregat-kependudukan>), bahwa pada tahun 2022, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.497.151 jiwa dengan total luas wilayah 146.807 km<sup>2</sup>.

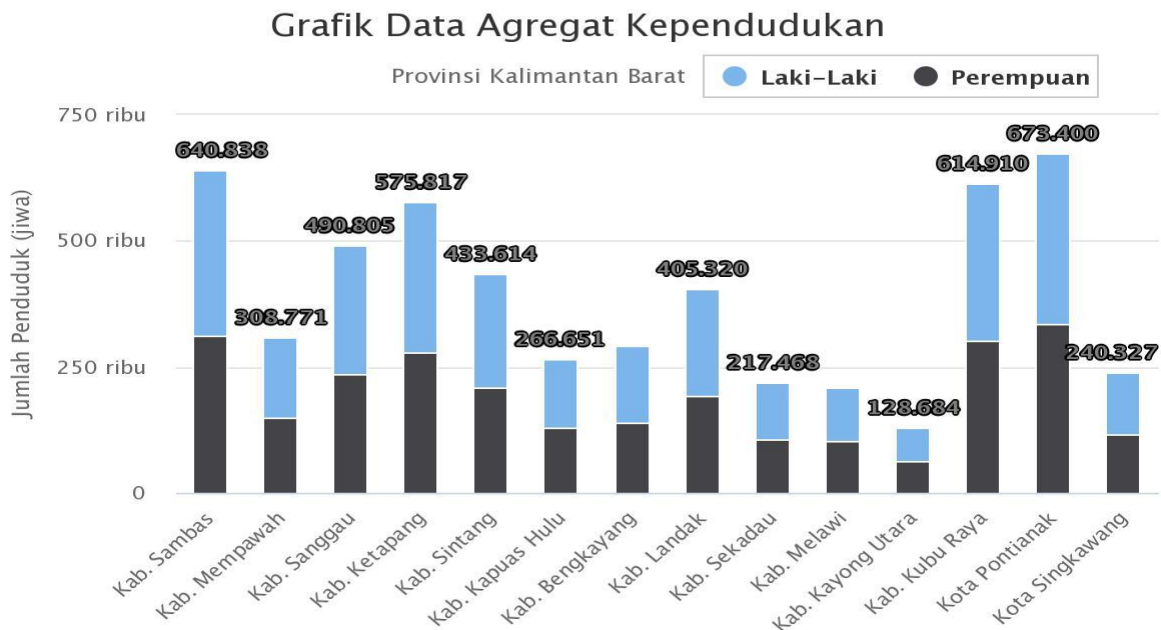
Gambaran Populasi Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Penduduk di Kalimantan Barat Tahun 2022**

No.	Wilayah Kalimantan Barat	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
		2022	2022	2022
1	Kalimantan Barat	2.826.287	2.670.864	5.497.151
2	Kab. Sambas	328.468	312.370	640.838
3	Kab. Mempawah	158.173	150.598	308.771
4	Kab. Sanggau	255.208	235.597	490.805
5	Kab. Ketapang	298.430	277.387	575.817
6	Kab. Sintang	224.384	209.230	433.614
7	Kab. Kapuas Hulu	136.680	129.971	266.651
8	Kab. Bengkayang	150.920	139.668	290.588
9	Kab. Landak	213.231	192.089	405.320
10	Kab. Sekadau	112.711	104.757	217.468
11	Kab. Melawi	108.297	101.661	209.958
12	Kab. Kayong Utara	66.276	62.408	128.684
13	Kab. Kubu Raya	313.951	300.959	614.910
14	Kota Pontianak	336.695	336.705	673.400
15	Kota Singkawang	122.863	117.464	240.327

Sumber: Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 1. Jumlah Penduduk di Kalimantan Barat Tahun 2022**

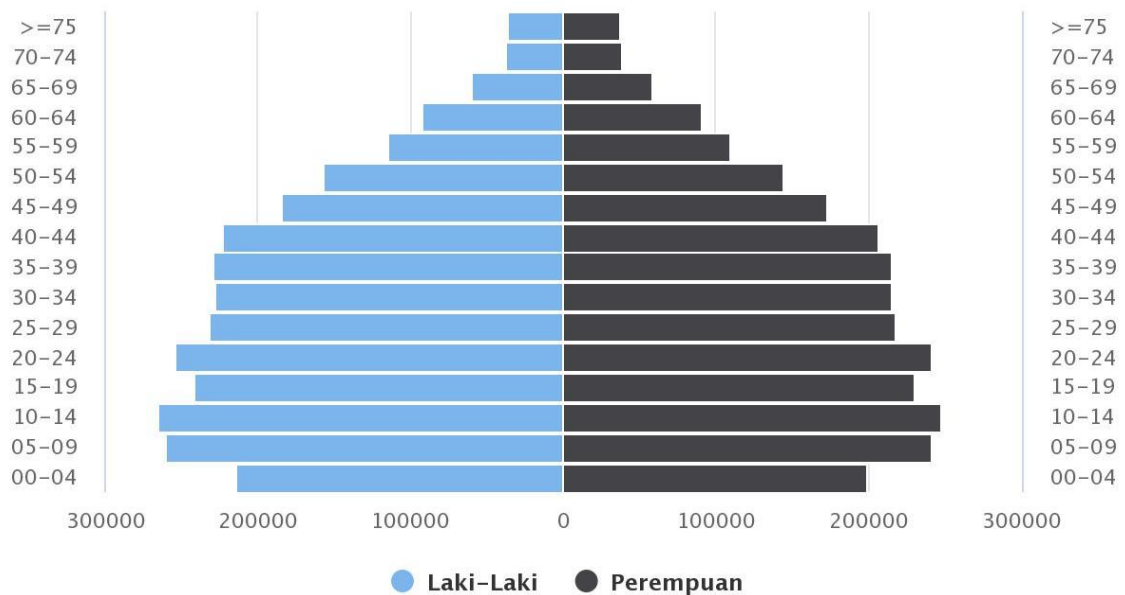


**Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur	Penduduk Kalimantan Barat 2022		
	L	P	L+P
00 - 04 Tahun	214	199	413
05 - 09 Tahun	260	242	502
10 - 14 Tahun	265	248	513
15 - 19 Tahun	242	230	472
20 - 24 Tahun	254	242	496
25 - 29 Tahun	231	217	449
30 - 34 Tahun	227	216	443
35 - 39 Tahun	229	215	444
40 - 44 Tahun	223	207	430
45 - 49 Tahun	185	173	358
50 - 54 Tahun	157	145	302
55 - 59 Tahun	114	110	224
60 - 64 Tahun	92	91	183
65 - 69 Tahun	60	59	119
70 - 74 Tahun	37	38	75
>= 75 Tahun	36	38	74
<b>Total</b>	<b>2.826.287</b>	<b>2.670.864</b>	<b>5.497.151</b>

Sumber: Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 2. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**



#### A.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi / Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Barat







Provinsi Kalimantan Barat terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia dengan Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur pada tanggal 29 Nopember 1956 oleh Presiden Republik Indoensia Soekarno dan Menteri Dalam Negeri Sunarjo dan diundangkan oleh Menteri Kehakiman Muljatno pada tanggal 7 Desember 1956 dengan Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956. Dalam Undang-Undang tersebut, Kalimantan Barat berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan batas-batas wilayah meliputi daerah-daerah otonom Kabupaten Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Kota Besar Pontianak.

Sejak terbentuknya Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak pada tahun 1956, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat terdiri dari 30 (tiga puluh) Anggota. Jumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Gubernur Kepala Daerah Provinsi yang menjabat ketua merangkap anggota Dewan Pemerintah Daerah Provinsi. Tahun 1956 Provinsi Kalimantan Barat meliputi :

- |                               |             |               |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| 1. Daerah Kabupaten Sambas    | penduduknya | 304.995 orang |
| 2. Daerah Kabupaten Pontianak | penduduknya | 386.460 orang |
| 3. Daerah Kabupaten Ketapang  | penduduknya | 120.152 orang |
| 4. Daerah Kabupaten Sanggau   | penduduknya | 165.770 orang |
| 5. Daerah Kabupaten Sintang   | penduduknya | 202.444 orang |

- |    |                              |             |                 |
|----|------------------------------|-------------|-----------------|
| 6. | Daerah kabupaten Kapuas Hulu | penduduknya | 30.229 orang    |
| 7. | Daerah Kota Besar Pontianak  | penduduknya | 160.000 orang   |
|    | Ibukota Pontianak :          |             | 1.370.050 orang |

**Tabel 4. Daftar Gubernur Kalimantan Barat dari Masa ke Masa**

No.	Foto	Gubernur	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Keterangan
1		Farel Pasaribu	1953	1957	Kepala Kerasidenan Kalimantan Barat
2		Adji Pangeran Afloes (Penjabat)	10 Januari 1957	24 April 1958	—
3		Djenal Asikin Judadibrata (Penjabat)	24 April 1958	30 Januari 1960	
4		Johanes Chrisostomus Oevaang Oeray	30 Januari 1960	1 Juli 1966	
5		Soemadi Bc.H.K.	1 Juli 1966	18 Agustus 1967	—
			18 Agustus 1967	27 September 1972	
6		Kol. Kadarusno	27 September 1972	30 Agustus 1977	
7		H. Soedjiman	30 Agustus 1977	4 Januari 1983	
			4 Januari 1983	8 Januari 1988	Abassuni Abubakar (1983-87)

No.	Foto	Gubernur	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Keterangan
8		Brigjend. TNI (Purn.) H. Parjoko Suryokusumo	8 Januari 1988	12 Januari 1993	Jimmi Mohammad Ibrahim (1987-92)
					Muchalli Thaufiek (1992-97)
9		Mayjend. TNI (Purn.) H. Aspar Aswin	12 Januari 1993	12 Januari 1998	Syarifuddin Lubis (1997-98)
			12 Januari 1998	13 Januari 2003	Djawari
9		H. Usman Ja'far	13 Januari 2003	14 Januari 2008	Laurentius Herman Kadir
10		Drs. Cornelis M.H.	14 Januari 2008	14 Januari 2013	Christiandy Sanjaya
			14 Januari 2013	14 Januari 2018	
11		Doddy Riyadmadji (Penjabat)	15 Januari 2018	5 September 2018	-
12		Sutarmidji	5 September 2018	Petahana	Ria Norsan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat

Sebelum Tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

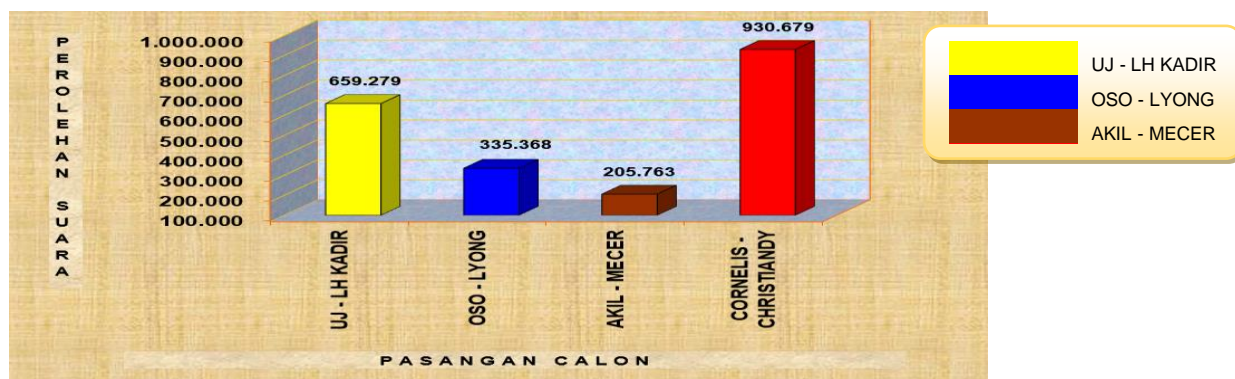
- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dilaksanakan pertama kali pada Tahun 2007 dengan 4 (empat) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yaitu :
1. H. Usman Ja'far dan Drs. Laurentius Herman Kadir;
  2. H. Oesman Sapta dan Drs. Ignatius Lyong, M.M.;
  3. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. dan Drs. A.R. Mecer; dan
  4. Drs. Corenlis, M.H. dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.

**Tabel 5. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007**

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pasangan Calon								Total Suara Sah		Total Suara Tidak Sah	
													
		1		2		3		4					
		Suara Sah	%	Suara Sah	%	Suara Sah	%	Suara Sah	%				
1	Kota Pontianak	120.400	49,16	54.399	22,21	18.595	7,59	51.512	21,03	244.906	98,62	3.420	1,38
2	Kota Singkawang	21.256	24,54	15.002	17,32	11.777	13,60	38.573	44,54	86.608	94,77	4.781	5,23
3	Kab. Pontianak	153.481	47,64	67.375	20,91	25.979	8,06	75.334	23,38	322.169	98,16	6.036	1,84
4	Kab. Bengkayang	20.583	19,95	9.273	8,99	5.310	5,15	68.019	65,92	103.185	98,48	1.589	1,52
5	Kab. Sambas	106.585	48,48	46.480	21,14	32.324	14,70	34.447	15,67	219.836	98,39	3.608	1,61
6	Kab. Landak	12.113	5,73	10.726	5,07	7.944	3,76	180.601	85,44	211.384	99,26	1.573	0,74
7	Kab. Sanggau	43.748	19,85	10.986	4,99	14.466	6,56	151.177	68,60	220.377	98,59	3.163	1,41
8	Kab. Sekadau	33.206	34,64	3.205	3,34	10.880	11,35	48.577	50,67	95.868	99,05	915	0,95
9	Kab. Sintang	36.961	19,17	8.832	4,58	23.499	12,19	123.487	64,06	192.779	98,88	2.182	1,12
10	Kab. Melawi	40.340	41,99	3.344	3,48	9.439	9,83	42.947	44,70	96.070	98,95	1.015	1,05
11	Kab. Kapuas hulu	39.117	33,33	5.913	5,04	26.171	22,30	46.159	39,33	117.360	98,79	1.434	1,21
12	Kab. Ketapang	31.489	14,28	99.833	45,27	19.379	8,79	69.846	31,67	220.547	97,89	4.744	2,11
JUMLAH		659.279	30,94	335.368	15,74	205.763	9,66	930.679	43,67	2.131.089	98,41	34.460	1,59

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 3. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007**



Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

- b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dilaksanakan pertama kali pada Tahun 2012 dengan 4 (empat) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yaitu :
1. Drs. Cornelis, M.H dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.;
  2. H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag.;
  3. H. Morkes Effendi, S.Pd., M.H. dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid; dan
  4. Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K.

**Tabel 6. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012**

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Suara Sah)				Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
		Drs. Cornelis, M.H dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.	H.Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag.	H. Morkes Effendi, S.Pd., M.H. dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K.		
1	Kab. Pontianak	46.579	24.882	31.928	6.517	1.656	111.562
2	Kab. Kubu Raya	84.603	57.675	65.167	22.121	3.817	233.383
3	Kab. Bengkayang	83.138	9.590	15.431	3.557	1.793	113.509
4	Kab. Sambas	56.552	44.053	132.652	13.169	3.608	250.034
5	Kab. Landak	213.758	4.751	8.024	4.462	2.269	233.264
6	Kab. Sanggau	173.127	16.974	35.850	10.582	3.678	240.211
7	Kab. Sekadau	66.144	6.782	25.100	6.993	1.241	106.260
8	Kab. Sintang	120.906	14.686	68.251	10.895	3.315	218.053
9	Kab. Melawi	64.446	8.298	39.656	8.931	1.419	122.750
10	Kab. Kapuas Hulu	54.573	7.686	11.709	54.701	1.839	130.508
11	Kab. Ketapang	111.034	20.547	72.945	9.519	4.280	218.325
12	Kab. Kayong Utara	11.504	7.651	18.343	3.642	1.141	42.281
13	Kota Pontianak	90.447	110.107	48.783	13.708	3.867	266.912
14	Kota Singkawang	48.374	28.062	17.242	3.219	4.196	101.093
	<b>Total</b>	<b>1.225.185</b>	<b>361.744</b>	<b>591.081</b>	<b>172.016</b>	<b>38.119</b>	<b>2.388.145</b>

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 4. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012**



Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dilaksanakan pertama kali pada Tahun 2018 dengan 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yaitu :

1. Drs. Milton Crosby, M.Si. dan H. Boyman Harun, S.H.;
2. dr. Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot, M.Pd.;
3. H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.;

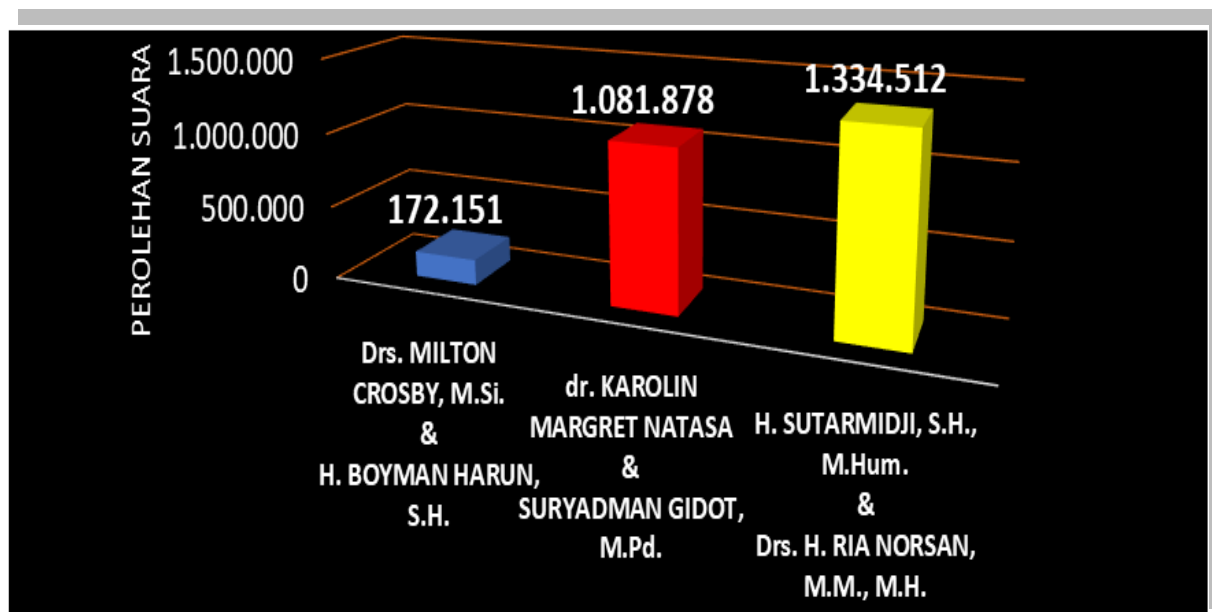
Hasil perolehan suara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018**

Kabupaten / Kota	Perolehan Suara Calon						TOTAL SUARA				
	1 Drs. Milton Crosby, M.Si. & H. Boyman Harun, S.H.		2 dr. Karolin Margret Natasa & Suryadman Gidot, M.Pd.		3 H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. & Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.						
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Suara Sah	%	Suara Tidak Sah	%	Total Suara Sah & Tidak Sah
Kab. Bengkayang	3.817	3,06%	87.365	69,97%	33.682	26,97%	124.864	98,55%	1.838	1,45%	126.702
Kab. Kapuas Hulu	6.051	4,69%	59.204	45,87%	63.814	49,44%	129.069	98,39%	2.106	1,61%	131.175
Kab. Kayong Utara	5.231	9,37%	9.679	17,33%	40.944	73,31%	55.854	95,48%	2.643	4,52%	58.497
Kab. Ketapang	14.366	6,34%	87.241	38,48%	125.140	55,19%	226.747	98,65%	3.098	1,35%	229.845
Kota Pontianak	4.809	1,52%	73.100	23,06%	239.135	75,43%	317.044	98,03%	6.367	1,97%	323.411
Kota Singkawang	1.732	1,90%	37.330	40,98%	52.023	57,11%	91.085	98,89%	1.021	1,11%	92.106
Kab. Kubu raya	14.248	5,09%	65.155	23,28%	200.484	71,63%	279.887	96,23%	10.957	3,77%	290.844
Kab. Landak	6.361	2,59%	218.968	89,02%	20.634	8,39%	245.963	98,80%	2.995	1,20%	248.958
Kab. Melawi	15.099	11,63%	50.152	38,63%	64.581	49,74%	129.832	98,58%	1.872	1,42%	131.704
Kab. Mempawah	3.561	2,70%	38.717	29,32%	89.773	67,98%	132.051	96,90%	4.229	3,10%	136.280
Kab. Sambas	9.093	3,14%	53.264	18,39%	227.315	78,47%	289.672	98,86%	3.340	1,14%	293.012
Kab. Sanggau	24.568	10,28%	151.450	63,34%	63.080	26,38%	239.098	96,49%	8.706	3,51%	247.804
Kab. Sekadau	22.480	20,65%	52.087	47,84%	34.316	31,52%	108.883	98,88%	1.232	1,12%	110.115
Kab. Sintang	40.735	18,64%	98.166	44,93%	79.591	36,43%	218.492	97,97%	4.529	2,03%	223.021
J U M L A H	172.151	6,65%	1.081.878	41,79%	1.334.512	51,55%	2.588.541	97,92%	54.933	2,08%	2.643.474

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 5. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018**



Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden hingga wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Indonesia telah melaksanakan beberapa kali Pemilu, dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu tahun 2004 merupakan Pemilu pertama pasca perubahan amandemen UUD 1945. Pemilihan kali ini merupakan pemilihan yang diikuti banyak partai. Ada dua macam pemilihan umum, yang pertama pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi *parliamentary threshold*. Saat itu, pemilu diikuti oleh 24 partai politik dan diselenggarakan pada 5 April 2004. Yang kedua, melakukan pemilihan presiden yang diikuti oleh lima pasangan calon. Namun, tidak disangka pada pemilihan calon presiden tahun 2004 dilakukan dua putaran. Putaran pertama dilakukan pada 5 Juli 2004, sedangkan putaran kedua dilakukan pada 20 September 2004.

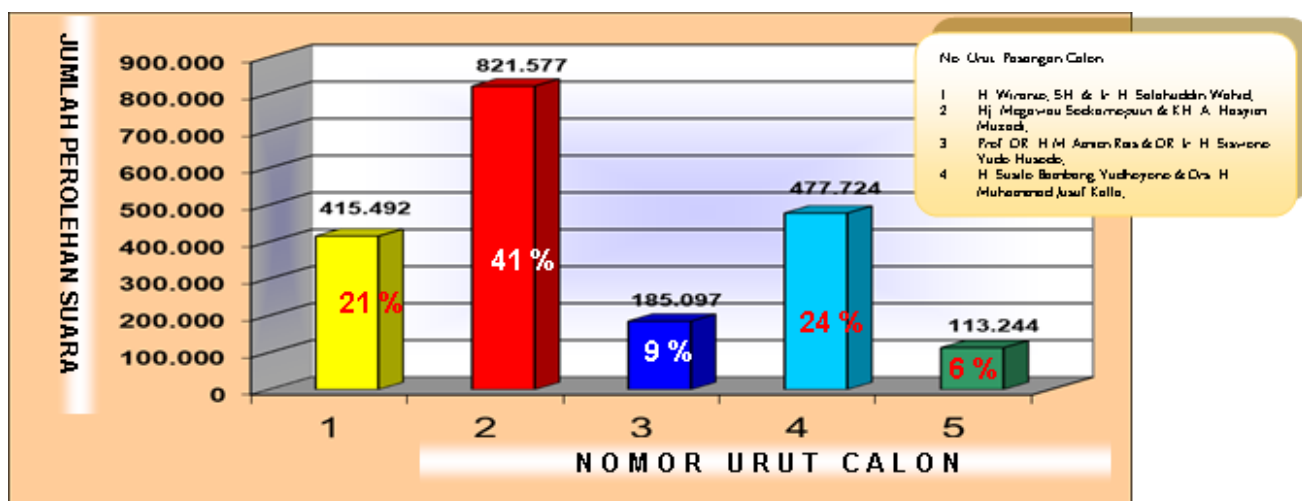
Dalam Pemilu 2004, ada perbedaan sistem bila dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan DPR/DPRD, sistem pemilihan DPD, dan pemilihan presiden-wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya. Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, pelaksanaan pemungutan suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif dimulai pada tahun 2004. Pemilihan Umum tersebut memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Berikut hasil perhitungan suara pada Pemilu Tahun 2004 di Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 8. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2004**

Kabupaten / Kota	Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden					Jumlah Suara		
						Sah	Tidak Sah	Total
	1	2	3	4	5			
Kota Pontianak	56.918	56.669	51.152	75.770	9.508	250.017	3.238	253.255
Kabupaten Pontianak	92.890	71.586	34.776	95.802	16.368	311.422	7.018	318.440
Kota Singkawang	11.910	37.224	7.170	16.847	2.035	75.186	1.444	76.630
Kabupaten Bengkayang	17.944	52.057	4.420	16.621	2.521	93.563	2.487	96.050
Kabupaten Sambas	52.179	92.450	23.384	36.621	24.481	229.115	3.380	232.495
Kabupaten Landak	14.640	122.958	2.421	20.581	1.260	161.860	4.545	166.405
Kabupaten Sanggau	28.914	110.153	8.230	47.291	3.747	198.335	4.927	203.262
Kabupaten Sekadau	16.704	46.973	3.073	19.145	2.039	87.934	2.895	90.829
Kabupaten Sintang	31.446	81.567	13.316	46.448	3.854	176.631	5.554	182.185
Kabupaten Melawi	21.458	32.220	13.283	19.301	2.860	89.122	1.337	90.459
Kabupaten Kapuas Hulu	19.603	53.921	9.938	23.912	7.184	114.558	1.834	116.392
Kabupaten Ketapang	50.886	63.799	13.934	59.385	37.387	225.391	8.164	233.555
<b>JMLAH SUARA</b>	<b>415.492</b>	<b>821.577</b>	<b>185.097</b>	<b>477.724</b>	<b>113.244</b>	<b>2.013.134</b>	<b>46.823</b>	<b>2.059.957</b>
<b>%</b>	<b>21%</b>	<b>41%</b>	<b>9%</b>	<b>24%</b>	<b>6%</b>	<b>98%</b>	<b>2%</b>	<b>-</b>





Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 6. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2004**



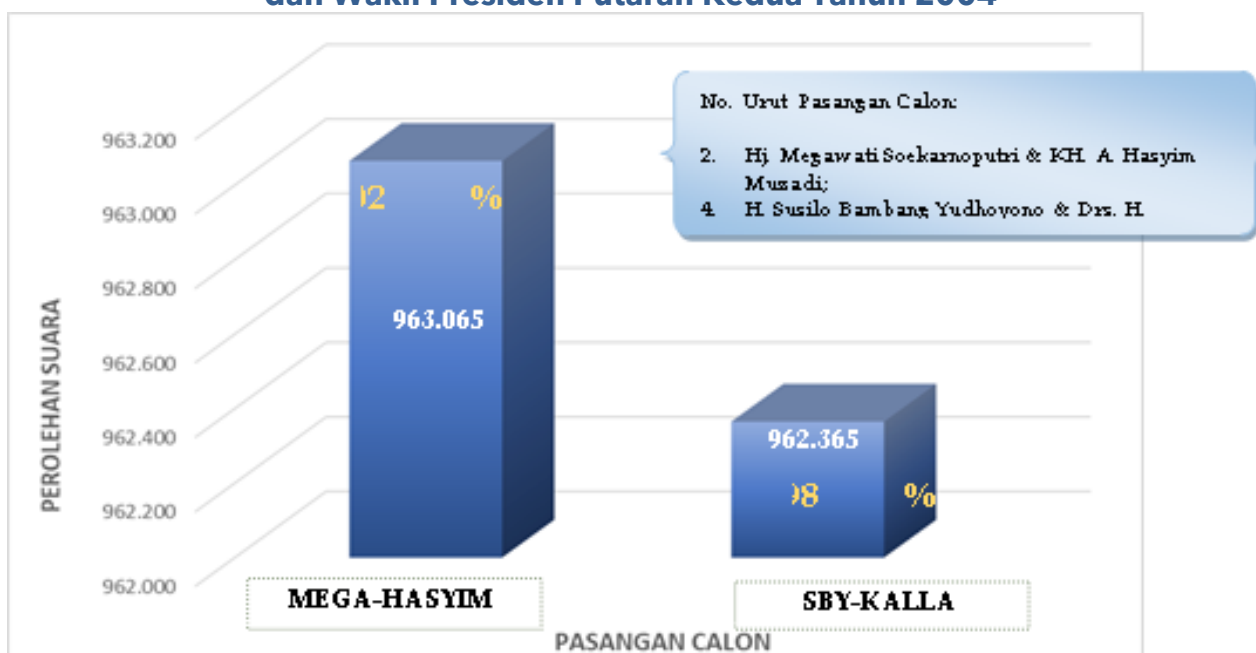
Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 9. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004**

No	Kabupaten / Kota	Pasangan Calon				Jumlah Suara				
						Sah		Tidak Sah		Total
		2		4						
		Perolehan Suara	%	Perolehan Suara	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kota Pontianak	73.083	31,41%	159.561	68,59%	232.644	98,64%	3.204	1,36%	235.848
2	Kabupaten Pontianak	98.613	33,91%	192.220	66,09%	290.833	98,78%	3.588	1,22%	294.421
3	Kota Singkawang	39.943	55,76%	31.694	44,24%	71.637	98,75%	905	1,25%	72.542
4	Kabupaten Bengkayang	52.820	58,64%	37.249	41,36%	90.069	98,24%	1.609	1,76%	91.678
5	Kabupaten Sambas	119.482	54,75%	98.737	45,25%	218.219	99,01%	2.188	0,99%	220.407
6	Kabupaten Landak	119.781	73,80%	42.521	26,20%	162.302	99,26%	1.203	0,74%	163.505
7	Kabupaten Sanggau	118.775	60,73%	76.815	39,27%	195.590	99,05%	1.883	0,95%	197.473
8	Kabupaten Sekadau	49.522	57,07%	37.255	42,93%	86.777	99,35%	566	0,65%	87.343
9	Kabupaten Sintang	92.489	54,41%	77.482	45,59%	169.971	99,11%	1.533	0,89%	171.504
10	Kabupaten Melawi	42.272	50,20%	41.929	49,80%	84.201	98,93%	909	1,07%	85.110
11	Kabupaten Kapuas Hulu	64.518	58,06%	46.599	41,94%	111.117	99,21%	883	0,79%	112.000
12	Kabupaten Ketapang	91.767	43,27%	120.303	56,73%	212.070	98,44%	3.369	1,56%	215.439
JUMLAH SUARA		963.065	50,02%	962.365	49,98%	1.925.430	98,88%	21.840	1,12%	1.947.270

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 7. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004**



Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 10. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Berdasarkan Partai Politik Tahun 2004**

NO	NAMA PARTAI	KABUPATEN / KOTA												JUMLAH
		Kota Pontianak	Kab. Pontianak	Kota Singkawang	Kab. Bengkayang	Kab. Sambas	Kab. Landak	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kab. Melawi	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Ketapang	
1	PNI MARHAENISME	769	3.705	798	879	1.482	1.287	2.476	181	298	59	1.122	1.766	14.822
2	P B S D	1.344	1.516	368	2.072	2.469	4.186	2.983	736	550	406	599	1.546	18.775
3	P B R	5.128	7.076	1.205	337	9.255	778	1.770	1.004	4.115	1.761	1.837	4.252	38.518
4	PARTAI MERDEKA	1.033	1.665	157	590	2.031	829	840	237	5.216	1.532	4.547	2.206	20.883
5	P P R	25.153	40.568	3.335	3.192	18.331	3.398	11.329	4.830	9.215	4.902	11.983	21.169	157.405
6	P R D K	1.041	5.192	846	3.231	3.968	6.969	8.490	2.309	3.288	1.170	2.521	11.262	50.287
7	P R I B	1.539	959	3.965	541	3.432	1.532	3.410	516	259	547	4.410	511	21.621
8	P N B K	3.627	4.145	947	5.657	3.221	7.256	10.322	8.904	6.998	1.957	2.742	3.310	59.086
9	PARTAI DEMOKRAT	29.394	14.997	3.720	5.941	6.911	11.476	9.072	4.968	10.551	9.425	3.646	9.449	119.550
10	P K P I	3.275	4.507	1.190	2.393	1.559	2.587	3.114	2.174	2.289	1.575	3.331	4.988	32.982
11	PPDI	1.454	3.406	533	1.638	2.222	4.978	4.230	2.991	876	109	2.845	3.492	28.774
12	P R N U	3.809	4.195	997	692	203	474	1.128	88	143	72	314	1.045	13.160
13	P A N	12.962	11.980	2.760	2.329	13.271	2.036	8.087	2.467	5.377	9.001	3.548	5.637	79.455
14	P K P B	6.333	14.138	965	1.224	2.064	1.924	7.097	2.469	5.442	1.052	540	3.233	46.481
15	P K B	10.399	23.535	2.109	1.128	2.031	2.465	1.369	650	1.727	2.381	1.019	3.849	52.662
16	P K S	20.476	13.405	2.646	1.771	9.968	1.163	3.484	1.782	4.101	1.680	1.098	5.034	66.608
17	P B R	6.981	17.282	1.621	1.782	13.911	1.080	2.022	1.307	3.375	10.178	2.537	6.867	68.943
18	P D I - P	33.428	39.896	19.778	19.515	53.250	31.736	38.710	14.021	29.261	9.592	14.682	26.357	330.226
19	P D S	6.239	5.918	1.251	5.411	896	10.495	12.781	3.512	15.180	9.200	2.050	7.503	80.436
20	PARTAI GOLKAR	46.232	69.549	11.991	17.991	54.788	22.886	45.169	24.534	36.136	12.351	37.977	79.648	459.252
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA	873	2.045	207	1.457	1.350	1.549	805	495	2.772	589	767	1.449	14.358
22	P S I	2.676	3.370	787	544	1.724	6.499	3.751	1.372	2.707	649	209	1.165	25.453
23	P R D	2.931	7.177	1.332	728	5.502	6.047	3.932	3.156	6.070	1.285	5.817	6.187	50.164
24	PARTAI PELOPOR	632	4.130	1.645	1.937	2.276	4.562	2.875	973	7.174	813	1.014	527	28.558
JUMLAH		227.728	304.356	65.153	82.980	216.115	138.192	189.246	85.676	163.120	82.286	111.155	212.452	1.878.459

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 11. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2004**

No	Nama Calon	Kabupaten/Kota										Total Perolehan Suara	
		Kota Pontianak	Kab. Pontianak	Kota Singkawang	Kab. Bengkayang	Kab. Sambas	Kab. Landak	Kab. Sanggau	Kab. Sintang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Ketapang	Jumlah	%
1	Ny. Ermina <del>Manan</del>	2.705	4.413	1.108	3.291	2.775	7.246	7.103	4.859	2.298	3.821	39.619	2,2%
2	Drs. H. Gusti Mulia	14.291	8.017	1.627	4.254	1.525	2.417	7.915	4.258	3.598	15.064	62.966	3,4%
3	Effendy Y., SH.	5.002	7.500	1.120	6.009	1.373	1.507	4.459	4.654	2.882	5.540	40.046	2,2%
4	Bdr. Paul <del>Manan</del> Kanoh, M.A.	3.753	5.146	1.092	3.013	5.029	11.155	9.013	17.610	3.320	5.423	64.554	3,5%
5	Albanus <del>Manan</del> , SH.	5.359	9.652	1.778	5.968	3.723	8.872	8.107	6.528	2.678	9.525	62.190	3,4%
6	Drs. Andreas CP. F. Seri, <del>Sdr.</del>	2.196	5.131	901	4.201	2.156	2.849	9.416	5.244	2.180	9.501	43.775	2,4%
7	Hasiadi, BBA.	2.433	4.405	1.937	4.332	1.092	1.242	4.555	3.594	2.653	12.819	39.062	2,1%
8	<del>Hendriawan</del>	4.237	9.198	1.613	7.428	2.409	2.477	7.433	4.009	2.063	5.357	46.224	2,5%
9	Hendra Alis Nguai Jui Fen, SE.	6.236	5.144	2.859	3.428	5.277	2.437	5.989	5.017	1.289	3.765	41.441	2,3%
10	Maria Goreti, <del>Sdr.</del> , M.Si	4.802	9.130	1.564	4.528	12.012	34.432	29.781	16.294	16.421	9.937	138.901	7,6%
12	<del>Erdin</del> <del>Manan</del>	6.329	7.310	1.111	14.254	1.307	1.190	3.310	1.783	644	13.777	51.015	2,8%
13	<del>Basri</del>	1.361	1.916	358	1.858	633	630	2.202	1.932	1.598	18.981	31.469	1,7%
14	Ir. Said Djafar	10.661	23.601	845	1.666	762	1.452	4.947	3.448	1.492	2.526	51.400	2,8%
15	M. Ebbadi	1.718	2.935	478	847	398	818	1.119	1.020	386	11.201	20.920	1,1%
16	H. <del>Manan</del> , SE.	20.977	31.955	1.994	5.558	1.764	1.795	11.706	38.737	13.392	5.382	133.260	7,3%
17	Drs. Dionisius Calek	1.412	3.354	543	2.621	755	1.148	6.303	22.323	1.883	2.622	42.964	2,4%
18	H. Sri <del>Manan</del>	22.897	25.469	6.945	14.434	6.333	6.334	21.392	15.161	6.520	11.202	136.687	7,5%
19	Drs. H. <del>Manan</del>	8.612	9.727	3.959	19.808	3.949	2.288	14.673	5.545	1.628	4.067	74.256	4,1%
20	DR. Piet Herman <del>Abik</del> , M.Apa.Sc	5.369	13.059	2.475	5.488	7.057	15.418	61.036	19.357	8.795	34.509	172.563	9,4%
21	Arifin Alapan, SE.	1.435	4.471	505	1.752	1.334	3.943	3.273	2.320	890	2.402	22.325	1,2%
22	Ng Nam Jiu, SH.	4.580	4.055	7.503	4.797	1.753	2.590	5.465	3.485	1.294	3.254	38.776	2,1%
23	<del>Manan</del> , SE.	3.518	11.475	523	2.467	662	1.306	3.210	2.337	1.404	2.315	29.217	1,6%
24	Ir. <del>H. Gusti Hendriawan</del> , M.Sc, QAM	10.569	8.831	1.647	6.561	1.981	8.507	7.331	6.208	6.744	3.044	61.423	3,4%
25	H. <del>Manan</del> , M.Sc.	2.091	1.165	13.726	42.044	9.030	385	1.396	1.679	631	1.203	73.350	4,0%
26	H. Salman <del>Manan</del> , SH.	8.452	9.381	423	1.731	418	384	1.951	1.281	672	1.680	26.373	1,4%
27	Bambang <del>Manan</del> , S.I.P.	2.949	2.421	591	1.008	668	386	1.735	1.216	447	1.103	12.524	0,7%
28	<del>Manan</del> Fuad Asali	14.466	5.789	2.761	5.301	706	877	4.515	3.135	496	1.200	39.246	2,1%
29	Silvanus <del>Manan</del> , SH.	3.533	1.646	295	485	1.146	2.808	4.598	7.048	13.916	2.088	37.563	2,1%
30	<del>Manan</del> , SH.	1.144	2.669	325	358	806	2.867	1.152	1.013	689	826	11.849	0,6%
31	Ir. Lim Sui Kiang / <del>Manan</del>	10.993	12.572	1.662	2.823	654	1.835	2.736	1.404	722	2.337	37.738	2,1%
32	Drs. H. <del>Manan</del>	20.599	30.800	1.456	29.550	825	1.133	3.373	2.010	4.853	1.302	95.901	5,2%
33	DR. (bdr) Drs. Ikot Rinding	2.172	2.776	567	2.920	5.928	11.216	6.277	12.868	1.461	1.012	47.197	2,6%
TOTAL SUARA PER KAB/KOTA		216.851	285.113	66.291	214.783	86.240	143.944	267.471	227.377	109.939	208.785	1.826.794	100,0%

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 12. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004**

No.	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara								Total Perolehan Suara	
		Kalbar 1	Kalbar 2	Kalbar 3	Kalbar 4	Kalbar 5	Kalbar 6	Kalbar 7	Kalbar 8	Jumlah	%
1	PNI MARHAENISME	844	3.925	1.677	1.575	1.387	2.719	1.397	1.953	<b>15.477</b>	<b>0,81%</b>
2	P B S D	1.175	2.521	3.125	2.372	4.423	3.613	1.263	1.619	<b>20.111</b>	<b>1,05%</b>
3	P B B	4.981	7.322	1.875	9.070	700	3.256	8.423	4.455	<b>40.082</b>	<b>2,09%</b>
4	PARTAI MERDEKA	1.347	1.620	616	2.136	-	1.614	15.749	2.361	<b>25.443</b>	<b>1,33%</b>
5	P P P	24.248	40.960	7.143	16.452	2.972	15.228	26.830	22.018	<b>155.851</b>	<b>8,15%</b>
6	P P D K	1.158	5.662	4.475	4.006	7.474	10.728	7.384	13.193	<b>54.080</b>	<b>2,83%</b>
7	P P I B	1.068	1.097	4.545	3.680	1.421	3.893	5.258	656	<b>21.618</b>	<b>1,13%</b>
8	P N B K	3.232	3.818	6.801	3.525	7.306	14.254	4.714	3.283	<b>46.933</b>	<b>2,45%</b>
9	PARTAI DEMOKRAT	26.911	16.092	8.947	8.762	10.810	14.298	21.044	11.131	<b>117.995</b>	<b>6,17%</b>
10	P K P I	4.045	6.097	4.206	1.815	3.169	7.221	6.092	5.780	<b>38.425</b>	<b>2,01%</b>
11	PPDI	1.512	3.587	3.336	2.563	8.980	6.566	3.787	4.192	<b>34.523</b>	<b>1,80%</b>
12	P P N U I	3.732	4.573	2.195	-	210	1.172	482	1.036	<b>13.400</b>	<b>0,70%</b>
13	P A N	13.293	13.115	6.952	14.031	4.476	11.907	16.695	6.388	<b>86.857</b>	<b>4,54%</b>
14	P K P B	6.961	14.212	2.118	2.091	1.832	13.990	7.166	3.179	<b>51.549</b>	<b>2,69%</b>
15	P K B	9.694	24.605	3.244	1.791	2.399	2.261	4.687	4.060	<b>52.741</b>	<b>2,76%</b>
16	P K S	20.080	12.803	5.660	10.443	1.098	5.012	7.351	5.245	<b>67.692</b>	<b>3,54%</b>
17	P B R	6.799	16.505	3.861	13.961	1.152	3.461	16.526	7.192	<b>69.457</b>	<b>3,63%</b>
18	P D I - P	31.508	43.047	41.192	50.851	30.333	50.973	52.117	26.650	<b>326.671</b>	<b>17,07%</b>
19	P D S	7.106	6.405	6.653	1.041	9.848	21.561	26.871	7.910	<b>87.395</b>	<b>4,57%</b>
20	PARTAI GOLKAR	48.143	66.120	31.182	54.784	18.428	68.845	85.878	83.660	<b>457.040</b>	<b>23,89%</b>
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA	963	2.559	1.737	1.631	1.611	-	6.009	-	<b>14.510</b>	<b>0,76%</b>
22	P S I	3.148	4.092	1.365	1.731	7.699	5.220	3.865	972	<b>28.092</b>	<b>1,47%</b>
23	P P D	4.840	8.182	2.531	5.547	5.897	6.757	14.311	6.372	<b>54.437</b>	<b>2,85%</b>
24	PARTAI PELOPOR	1.022	5.084	3.962	2.328	5.024	4.489	10.708	426	<b>33.043</b>	<b>1,73%</b>
<b>J U M L A H</b>		<b>227.810</b>	<b>314.003</b>	<b>159.398</b>	<b>216.186</b>	<b>138.649</b>	<b>279.038</b>	<b>354.607</b>	<b>223.731</b>	<b>1.913.422</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat*

Pemilu Tahun 2009 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 dengan 3 (tiga) Pasangan Calon, sedangkan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 dengan peserta partai politik sebanyak 38 (tiga puluh delapan) partai politik. Di Provinsi Kalimantan Barat, hasil perhitungan suara untuk Pemilu 2009 adalah sebagai berikut :

**Tabel 13. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009**

No.	Kabupaten/Kota	Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Jumlah Suara
		Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto	Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono	H. M. Jusuf Kalla dan H. Wiranto			
1	Kab. Sambas	68.517	143.170	28.891	240.578	12.157	252.735
2	Kab. Bengkayang	46.980	54.204	6.774	107.958	4.180	112.138
3	Kab. Landak	142.294	57.003	6.113	205.410	4.984	210.394
4	Kab. Pontianak	19.365	82.103	10.200	111.668	5.475	117.143
5	Kab. Sanggau	125.226	89.971	11.315	226.512	10.034	236.546
6	Kab. Sekadau	51.739	40.812	7.476	100.027	3.384	103.411
7	Kab. Ketapang	87.199	99.926	20.401	207.526	11.296	218.822
8	Kab. Sintang	102.482	95.873	13.241	211.596	5.020	216.616
9	Kab. Melawi	51.589	50.212	13.962	115.763	1.751	117.514
10	Kab. Kapuas Hulu	55.918	61.330	11.272	128.520	3.267	131.787
11	Kota Pontianak	32.878	207.766	32.154	272.798	8.617	281.415
12	Kota Singkawang	14.885	61.653	7.459	83.997	4.151	88.148
13	Kab. Kayong Utara	9.168	27.586	5.000	41.754	3.809	45.563
14	Kab. Kubu Raya	40.363	163.535	28.201	232.099	11.191	243.290
<b>Total Suara</b>		<b>848.603</b>	<b>1.235.144</b>	<b>202.459</b>	2.286.206	89.316	2.375.522
<b>% Suara</b>		<b>37%</b>	<b>54%</b>	<b>9%</b>	96%	4%	100%

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 8. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009**



Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 14. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan Partai Politik Tahun 2009**

No. Urut	Nama Parpol	Jumlah						Total Jumlah	Rank
		DPR		DPRD PROV		DPRD KAB/KOTA			
1	Partai Hanura	73.870	7	77.300	7	90.365	6	241.535	<b>7</b>
2	PKPB	38.103	12	40.047	13	56.245	11	134.395	13
3	PPPI	16.401	23	22.188	23	24.855	30	63.444	25
4	PPRN	16.801	21	21.235	25	31.469	22	69.505	21
5	Partai Gerindra	60.071	9	66.170	8	68.053	8	194.294	<b>8</b>
6	Partai Barnas	27.531	16	36.364	17	35.841	19	99.736	18
7	PKPI	24.021	17	38.802	14	47.964	15	110.787	16
8	PKS	80.784	6	93.746	6	79.152	7	253.682	<b>6</b>
9	PAN	105.797	5	102.231	5	110.009	4	318.037	<b>5</b>
10	PIB	23.074	18	37.633	15	50.789	14	111.496	15
11	Partai Kedaulatan	11.700	28	21.940	24	25.459	26	59.099	27
12	PPD	69.576	8	55.821	11	65.326	9	190.723	<b>9</b>
13	PKB	36.499	13	28.985	19	44.335	18	109.819	17
14	PPI	16.223	24	21.023	26	22.211	31	59.457	26
15	PNI Marhaenisme	5.813	35	8.999	33	20.603	33	35.415	33
16	PDP	20.072	20	34.356	18	44.551	17	98.979	19
17	Pakar Pangan	16.525	22	17.470	30	33.154	20	67.149	22
18	PMB	6.418	33	8.993	34	13.849	36	29.260	34
19	PPDI	-	38	7.920	36	18.868	34	26.788	35
20	PDK	21.040	19	37.318	16	54.557	12	112.915	14
21	Partai RepublikaN	15.092	26	24.587	20	25.156	29	64.835	23
22	Partai Pelopor	13.599	27	16.210	31	26.586	24	56.395	28
23	Partai Golkar	288.112	2	295.665	2	281.544	1	865.321	<b>2</b>
24	PPP	120.945	4	102.359	4	104.580	5	327.884	<b>4</b>
25	PDS	57.475	10	58.472	10	53.680	13	169.627	<b>10</b>
26	PNBK Indonesia	42.468	11	50.599	12	47.581	16	140.648	12
27	PBB	33.030	14	23.261	22	32.909	21	89.200	20
28	PDI Perjuangan	466.012	1	303.129	1	244.509	2	1.013.650	<b>1</b>
29	PBR	32.297	15	60.955	9	59.142	10	152.394	11
30	Partai Patriot	7.272	32	20.129	27	25.689	25	53.090	30
31	Partai Demokrat	230.639	3	244.255	3	186.919	3	661.813	<b>3</b>
32	PKDI	9.556	30	23.372	21	20.959	32	53.887	29
33	PIS	10.505	29	12.339	32	25.412	27	48.256	32
34	PKNU	16.016	25	18.902	29	29.441	23	64.359	24
41	Partai Merdeka	8.009	31	18.952	28	25.301	28	52.262	31
42	PPNUI	3.922	37	8.078	35	13.700	37	25.700	37
43	PSI	6.096	34	4.718	38	11.862	38	22.676	38
44	Partai Buruh	5.340	36	6.044	37	14.929	35	26.313	36
JUMLAH SUARA SAH		2.036.704		2.070.567		2.167.554			

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 15. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2009**

Nomor dan Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten / Kota														Jumlah Akhir	Rank
	Kota Pontianak	Kab. Pontianak	Kab. Kubu Raya	Kab. Bengkayang	Kota Singkawang	Kab. Sambas	Kab. Landak	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kab. Melawi	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Ketapang	Kab. Kayong Utara		
1. Abetnego, S.Th.	3.825	2.462	5.278	5.844	2.563	9.598	20.082	12.573	6.131	15.705	6.956	4.825	9.746	2.103	107.691	6
2. Achmad Husaini, S.E.	6.888	1.976	5.667	2.734	1.506	6.564	2.740	5.912	3.617	4.495	1.406	2.070	5.101	1.861	52.537	17
3. Andreas Acui Simanungkal	18.618	2.142	6.130	3.099	8.666	7.854	3.740	8.137	2.053	3.311	1.426	1.418	4.843	1.089	72.526	13
4. Arifin Alapan, S.E.	5.020	2.774	6.997	6.198	2.183	6.869	12.385	11.321	3.729	5.916	2.585	3.000	6.155	1.356	76.488	12
5. Aspar, H., S.E.	10.304	8.200	10.571	2.038	2.518	14.750	2.965	5.475	3.127	6.436	17.229	9.593	7.168	1.872	102.246	7
6. Cosmas Damianus Yan Kay	2.507	692	3.119	1.865	663	2.748	1.767	3.128	1.339	2.326	1.219	2.560	2.999	643	27.575	25
7. Erma Suryani Banik S.H.	6.206	1.725	5.919	14.934	2.799	5.802	11.794	13.180	10.339	14.792	7.688	4.812	16.201	2.149	118.340	4
8. Hajjah, H., S.H., M.A.	27.057	4.057	18.522	3.662	3.260	25.318	3.018	7.380	3.367	6.287	2.990	6.703	10.774	2.459	124.854	3
9. Harmanawati	6.212	3.648	8.530	1.700	1.839	14.397	1.347	3.775	2.456	3.884	2.976	3.496	4.917	2.350	61.527	14
10. Ishaq Saleh, H.	23.150	4.104	11.972	2.430	5.061	16.288	2.653	8.576	3.097	6.105	10.511	7.736	7.306	1.645	110.634	5
11. M. Alias, S.Ag. S.Pd.	8.433	2.758	10.412	1.636	1.991	4.975	1.927	2.862	1.780	3.703	2.782	3.456	6.114	1.506	54.335	16
12. M. Idrus, H., Drs	7.137	4.328	8.927	1.391	1.436	5.684	1.042	2.604	2.015	3.770	1.748	2.771	5.174	3.045	51.072	18
13. Maman Suwanto	5.603	11.578	4.147	2.440	2.294	4.164	1.506	2.960	1.604	2.586	1.270	2.023	2.426	726	45.327	20
14. Maria Goreti, S.Sos. M.Si.	4.091	2.963	4.130	13.924	1.700	5.122	34.583	25.061	12.468	24.636	4.089	13.225	11.495	428	157.915	1
15. Michell Eko Haddian S.H.	1.801	789	3.403	2.945	866	1.540	2.741	10.459	12.256	20.830	24.926	4.730	8.357	304	95.947	8
16. Moh. Naib Tappi, H.	8.335	1.684	8.373	1.867	2.107	6.963	1.999	4.718	3.260	4.203	2.589	3.970	5.547	1.593	57.208	15
17. Naziqin, S.H.	3.925	5.999	4.375	667	858	3.001	1.167	1.854	998	2.384	491	1.055	1.389	469	28.632	24
18. Nico Andas Putra	1.722	735	1.615	3.203	634	1.507	16.420	5.706	2.231	3.208	2.470	1.143	5.102	461	46.157	19
19. Nico Babayo Gading, S.Th., M.Div.	4.308	1.187	2.595	1.968	2.972	2.702	6.108	4.470	1.931	4.881	1.978	1.613	4.454	701	41.868	21
20. Oktapius, S.H., M.H.	4.013	4.227	6.782	3.925	4.100	3.830	27.379	4.959	2.002	9.514	1.136	8.387	2.847	787	83.888	10
21. Piet Herman Abik, Dr	2.155	899	1.568	3.694	923	2.256	10.797	28.903	4.313	18.916	1.364	5.316	10.696	486	92.286	9
22. R. Epepus Nwarong, S.H., M.H.	1.333	1.130	1.901	1.511	712	1.305	6.702	2.978	801	2.309	612	884	2.747	339	25.264	26
23. Sri Kadawati, Hj.	20.781	5.149	16.107	6.218	5.583	19.729	4.711	15.469	5.551	13.062	4.122	14.125	16.792	4.203	151.602	2
24. ST. Petrusus Bawigan, Drs	3.272	940	2.637	1.788	1.307	2.218	2.507	5.249	2.139	4.525	771	6.828	3.152	496	37.829	22
25. Suwanto, B.Sc., S.H.	8.659	4.953	3.497	1.842	2.486	4.772	1.372	2.234	1.164	1.160	856	767	1.662	763	36.187	23
26. Swamsul Rizal, H., Drs	9.488	1.820	5.723	4.411	9.922	29.345	2.310	3.366	2.871	1.793	713	1.658	3.587	1.955	78.962	11
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>204.843</b>	<b>82.919</b>	<b>168.897</b>	<b>97.934</b>	<b>70.949</b>	<b>209.301</b>	<b>185.762</b>	<b>203.309</b>	<b>96.639</b>	<b>190.737</b>	<b>106.903</b>	<b>118.164</b>	<b>166.751</b>	<b>35.789</b>	<b>1.938.897</b>	

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

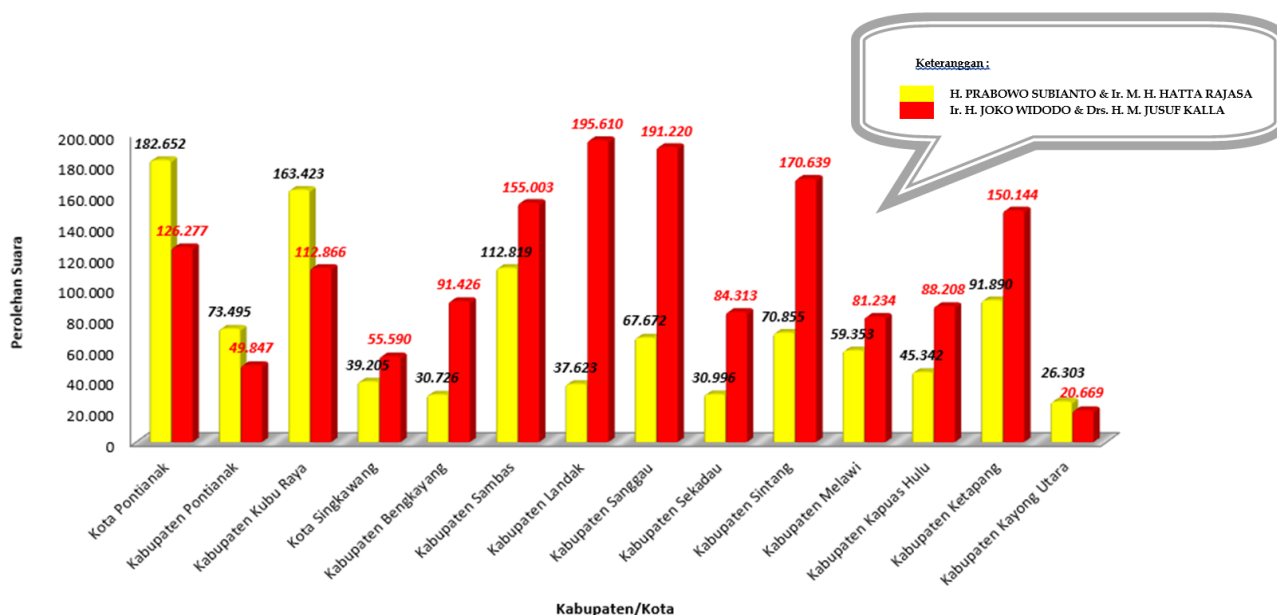
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilaksanakan pada 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mas abakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan langsung ketiga kalinya di Indonesia. Sedangkan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 periode 2014-2019. Berikut hasil perhitungan suara Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 16. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014**

No	Kabupaten / Kota	Perolehan Suara Calon				TOTAL PEROLEHAN SUARA				
		1 H. Prabowo Subianto & Ir. M. H. Hatta Rajasa		2 Ir. H. Joko Widodo & Drs. H. M. Jusuf Kalla						
		Jumlah	%	Jumlah	%	Suara Sah	%	Suara Tidak Sah	%	Total Suara Sah & Tidak Sah
1	Kota Pontianak	182.652	59,12%	126.277	40,88%	308.929	99,41%	1.821	0,59%	310.750
2	Kabupaten Pontianak	73.495	59,59%	49.847	40,41%	123.342	99,45%	685	0,55%	124.027
3	Kabupaten Kubu Raya	163.423	59,15%	112.866	40,85%	276.289	99,45%	1.518	0,55%	277.807
4	Kota Singkawang	39.205	41,36%	55.590	58,64%	94.795	99,26%	706	0,74%	95.501
5	Kabupaten Bengkayang	30.726	25,15%	91.426	74,85%	122.152	99,22%	964	0,78%	123.116
6	Kabupaten Sambas	112.819	42,12%	155.003	57,88%	267.822	99,32%	1.829	0,68%	269.651
7	Kabupaten Landak	37.623	16,13%	195.610	83,87%	233.233	99,40%	1.411	0,60%	234.644
8	Kabupaten Sanggau	67.672	26,14%	191.220	73,86%	258.892	99,33%	1.748	0,67%	260.640
9	Kabupaten Sekadau	30.996	26,88%	84.313	73,12%	115.309	99,51%	572	0,49%	115.881
10	Kabupaten Sintang	70.855	29,34%	170.639	70,66%	241.494	99,39%	1.484	0,61%	242.978
11	Kabupaten Melawi	59.353	42,22%	81.234	57,78%	140.587	99,44%	798	0,56%	141.385
12	Kabupaten Kapuas Hulu	45.342	33,95%	88.208	66,05%	133.550	99,40%	812	0,60%	134.362
13	Kabupaten Ketapang	91.890	37,97%	150.144	62,03%	242.034	99,27%	1.769	0,73%	243.803
14	Kabupaten Kayong Utara	26.303	56,00%	20.669	44,00%	46.972	99,12%	416	0,88%	47.388
J U M L A H		1.032.354	39,62%	1.573.046	60,38%	2.605.400	99,37%	16.533	0,63%	2.621.933

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 9. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014**



Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 17. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Tahun 2014**

PARTAI POLITIK															JUMLAH
No	Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15		
		Partai NasDem	PKB	PKS	PDI Perjuangan	Partai GOLKAR	Partai GERINDRA	Partai Demokrat	PAN	PPP	Partai HANURA	PBB	PKPI		
1	Kota Pontianak	33.974	17.284	19.867	47.611	46.444	25.606	22.374	15.899	24.071	11.552	6.301	4.808	275.791	
		12,32%	6,27%	7,20%	17,26%	16,84%	9,28%	8,11%	5,76%	8,73%	4,19%	2,28%	1,74%		
2	Kab. Pontianak	10.423	14.483	7.612	21.821	21.896	9.285	9.923	5.371	6.676	4.422	2.251	1.212	115.375	
		9,03%	12,55%	6,60%	18,91%	18,98%	8,05%	8,60%	4,66%	5,79%	3,83%	1,95%	1,05%		
3	Kab. Kubu Raya	28.953	15.305	16.499	53.952	56.375	28.838	17.576	12.729	14.260	8.774	2.910	2.577	258.748	
		11,19%	5,92%	6,38%	20,85%	21,79%	11,15%	6,79%	4,92%	5,51%	3,39%	1,12%	1,00%		
4	Kota Singkawang	5.821	6.506	4.999	16.833	11.618	20.669	5.017	6.500	4.667	3.494	1.327	818	88.269	
		6,59%	7,37%	5,66%	19,07%	13,16%	23,42%	5,68%	7,36%	5,29%	3,96%	1,50%	0,93%		
5	Kab. Bengkayang	7.419	5.187	4.229	45.119	9.789	14.708	19.631	3.281	1.971	5.441	300	2.157	119.232	
		6,22%	4,35%	3,55%	37,84%	8,21%	12,34%	16,46%	2,75%	1,65%	4,56%	0,25%	1,81%		
6	Kab. Sambas	17.992	9.872	14.338	37.188	40.770	29.024	14.446	54.905	12.775	10.232	6.177	4.162	251.881	
		7,14%	3,92%	5,69%	14,76%	16,19%	11,52%	5,74%	21,80%	5,07%	4,06%	2,45%	1,65%		
7	Kab. Landak	11.012	5.403	4.615	147.179	9.207	15.036	13.065	3.921	1.855	3.002	330	3.153	217.778	
		5,06%	2,48%	2,12%	67,58%	4,23%	6,90%	6,00%	1,80%	0,85%	1,38%	0,15%	1,45%		
8	Kab. Sanggau	11.832	9.382	4.798	99.588	25.936	32.328	18.969	7.561	11.092	9.449	818	6.013	237.766	
		4,98%	3,95%	2,02%	41,88%	10,91%	13,60%	7,98%	3,18%	4,67%	3,97%	0,34%	2,53%		
9	Kab. Sekadau	5.503	2.964	2.468	45.678	7.942	9.186	14.219	4.939	15.041	3.365	550	2.641	114.496	
		4,81%	2,59%	2,16%	39,89%	6,94%	8,02%	12,42%	4,31%	13,14%	2,94%	0,48%	2,31%		
10	Kab. Sintang	10.176	9.938	6.567	106.986	15.816	18.517	25.261	12.685	10.333	6.359	5.210	4.678	232.526	
		4,38%	4,27%	2,82%	46,01%	6,80%	7,96%	10,86%	5,46%	4,44%	2,73%	2,24%	2,01%		
11	Kab. Melawi	2.777	2.092	2.123	50.942	12.767	6.568	6.918	43.856	5.973	1.940	559	1.257	137.772	
		2,02%	1,52%	1,54%	36,98%	9,27%	4,77%	5,02%	31,83%	4,34%	1,41%	0,41%	0,91%		
12	Kab. Kapuas Hulu	5.478	6.160	4.070	66.101	14.968	9.190	7.144	8.050	9.829	3.243	969	2.729	137.931	
		3,97%	4,47%	2,95%	47,92%	10,85%	6,66%	5,18%	5,84%	7,13%	2,35%	0,70%	1,98%		
13	Kab. Ketapang	13.257	8.767	7.577	73.452	64.695	12.733	17.536	12.421	13.840	12.802	1.960	1.468	240.508	
		5,51%	3,65%	3,15%	30,54%	26,90%	5,29%	7,29%	5,16%	5,75%	5,32%	0,81%	0,61%		
14	Kab. Kayong Utara	4.124	4.594	2.384	5.320	10.763	4.593	4.811	4.094	4.181	2.666	1.151	1.508	50.189	
		8,22%	9,15%	4,75%	10,60%	21,44%	9,15%	9,59%	8,16%	8,33%	5,31%	2,29%	3,00%		
JUMLAH		168.741	117.937	102.146	817.770	348.986	236.281	196.890	196.212	136.564	86.741	30.813	39.181	2.478.262	
		6,81%	4,76%	4,12%	33,00%	14,08%	9,53%	7,94%	7,92%	5,51%	3,50%	1,24%	1,58%		
RANK		6	8	9	1	2	3	4	5	7	10	12	11		

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 18. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2014**

No.	Calon Anggota DPD	R I N C I A N															
		Kota Pontianak	Kab. Pontianak	Kab. Kubu Raya	Kota Singkawang	Kab. Bengkayang	Kab. Sambas	Kab. Landak	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kab. Melawi	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Ketapang	Kab. Kayong Utara	Jumlah akhir	Rank
1	Drs. H. Abdul Rahmi	24.535	9.014	20.681	7.853	6.631	27.118	6.012	15.290	13.761	13.013	7.372	10.639	19.973	3.733	185.625	3
2	H. Agus Hendro Prayitno	5.693	3.116	7.494	3.136	3.554	11.248	3.136	7.457	3.276	9.106	2.946	3.682	9.129	1.671	74.644	11
3	Drs. Agustinus Clarus, M.Si.	3.992	1.691	4.449	2.857	1.782	5.617	4.260	18.054	2.169	5.120	1.591	3.004	6.676	627	61.889	18
4	Aminudin Arianito, S.Pd., M.Si.	6.239	2.378	6.559	2.423	4.134	7.228	4.374	10.082	17.664	18.084	9.745	2.604	8.917	1.181	101.612	6
5																	
6	Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K.	7.682	2.737	5.896	3.683	4.193	6.064	10.473	13.308	3.651	10.366	4.686	3.001	7.123	1.145	84.008	7
7	Dra. Hj. Dewi Munawar	9.055	2.850	6.963	3.411	3.005	9.944	2.494	5.826	2.696	5.737	1.630	3.005	6.896	1.085	64.597	17
8	Doni Prasetya Satriadi	8.563	3.067	9.965	3.152	2.545	8.071	1.792	5.858	3.372	4.111	1.593	7.965	7.081	1.165	68.300	15
9	F.X. Trides Mecer	2.550	1.115	3.242	1.590	1.645	2.246	3.796	12.248	6.415	4.961	1.612	1.981	18.102	310	61.813	19
10	Hj. Hairiah, S.H., M.H.	28.823	7.715	21.175	4.961	5.082	37.057	2.237	5.487	2.186	3.850	1.201	3.234	7.601	883	131.492	5
11	Hendra Nurdiansyah	2.638	626	3.064	2.105	546	2.187	721	1.270	745	941	410	1.175	2.069	1.038	19.535	27
12	Ir. Hizas Abd. Hamid	2.802	564	2.199	687	377	1.861	346	999	528	789	2.518	655	2.394	272	16.991	29
13	Imam Muhadi	3.501	1.679	9.799	973	704	3.184	363	1.920	1.025	5.591	1.057	947	2.013	836	33.592	25
14	Indra Noviansyah, S.E.	12.764	5.647	13.450	1.707	973	5.531	778	3.886	817	3.572	21.168	3.785	3.535	779	78.392	9
15	H. Ishaq Saleh	13.421	5.131	7.391	1.981	1.138	8.741	614	3.668	1.836	2.679	4.534	3.740	2.684	704	58.262	20
16	Drs. Jacobus Luna, M.Si.	1.927	1.943	1.805	2.803	32.696	3.872	10.500	4.488	1.343	1.804	629	1.419	2.260	326	67.815	16
17	Klemen Apui	1.220	611	937	588	768	796	56.095	6.219	1.087	1.601	365	524	1.326	268	72.405	13
18	Ev. Lawadi Nusah, S.Pd.K.	929	528	932	494	1.583	782	1.771	1.249	630	1.143	245	495	1.265	263	12.309	31
19	M. Musa Surin, S.H., M.H.	2.339	294	1.633	275	297	809	373	875	682	1.132	273	603	1.715	283	11.583	32
20	M. Tamsil Sjoekoer, S.H.	4.909	1.095	3.590	434	321	999	675	2.848	1.354	4.239	3.713	20.662	1.798	173	46.810	23
21	Maria Goreti, S.Sos., M.Si.	10.021	5.202	7.516	3.799	8.360	4.836	54.743	48.565	22.766	28.420	16.902	13.194	21.543	462	246.329	1
22	Nagian Imawan, S.Sos.	20.670	15.352	31.423	2.687	917	592	3.802	1.267	321	791	203	732	3.842	440	83.039	8
23	Nobertus Rocki Susanto	12.669	6.370	4.988	6.073	899	3.943	11.882	5.778	1.481	3.223	1.650	16.059	1.661	154	76.830	10
24	Oesman Sapta	36.246	9.274	23.888	8.141	2.996	11.589	6.587	9.754	3.987	4.128	2.281	4.323	38.781	26.553	188.528	2
25	Drs. P.E. Chuno, M.Pd.	723	402	650	245	521	389	731	2.464	3.323	49.297	3.558	8.102	3.042	373	73.820	12
26	Petrus SA, S.H.	4.180	1.904	3.629	3.342	13.938	6.093	6.754	11.673	2.377	4.758	2.671	2.117	6.250	220	69.906	14
27	Hj. Rubaeti Erlita, S.Sos.I, S.H.	8.717	4.714	9.087	4.646	3.803	56.161	2.602	8.536	4.024	6.794	2.970	6.054	20.387	1.361	139.856	4
28	Sakpin Prokhorus, S.Th., M.Pd.K	1.168	683	959	756	516	562	4.789	3.866	1.384	2.804	2.973	930	1.425	121	22.936	26
29	Drs. Syafi'i	2.580	523	1.960	603	358	1.156	288	849	441	722	297	777	1.434	1.094	13.082	30
30	Syafrial Nur, S.H., M.Pd.	2.965	718	2.249	1.131	579	2.434	622	1.216	450	999	863	1.667	1.450	194	17.537	28

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

No.	Calon Anggota DPD	R I N C I A N															
		Kota Pontianak	Kab. Pontianak	Kab. Kubu Raya	Kota Singkawang	Kab. Bengkayang	Kab. Sambas	Kab. Landak	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kab. Melawi	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Ketapang	Kab. Kayong Utara	Jumlah akhir	Rank
31	Drs. Uray Usman Saidi. AS	3.301	1.028	2.557	1.550	944	3.675	519	1.844	1.009	2.757	24.061	1.565	1.876	360	47.046	22
32	Usmandy S, S.Sos., M.Si.	1.550	520	1.660	285	244	1.281	284	1.183	1.501	15.114	7.351	2.560	1.343	254	35.130	24
33	Drs. Yakobus Kumis	3.981	1.824	10.172	1.009	4.714	601	6.037	8.001	2.023	4.524	4.008	1.786	4.696	143	53.519	21
34	Zakarias, S.H.	449	250	464	289	3.133	427	1.220	765	206	477	171	248	715	194	9.008	33
Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPD		252.802	100.565	232.426	79.669	113.896	237.094	211.670	226.793	110.530	222.647	137.247	133.234	221.002	48.665	2.328.240	

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 19. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014**

No	Kabupaten/ Kota	Partai Politik												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	
		Partai NasDem	PKB	PKS	PDI Perjuang an	Partai GOLKAR	Partai GERIND RA	Partai Demokrat	PAN	PPP	Partai HANUR A	PBB	PKPI	
1	Kota Pontianak	22.141	21.488	20.129	49.655	26.821	23.560	22.170	22.351	30.764	13.635	6.146	29.039	287.899
		7,69%	7,46%	6,99%	17,25%	9,32%	8,18%	7,70%	7,76%	10,69%	4,74%	2,13%	10,09%	
2	Kab. Pontianak	11.049	8.281	5.692	21.501	12.133	11.831	24.076	4.318	10.350	4.897	1.429	2.924	118.481
		9,33%	6,99%	4,80%	18,15%	10,24%	9,99%	20,32%	3,64%	8,74%	4,13%	1,21%	2,47%	
3	Kab. Kubu Raya	22.945	12.914	16.863	54.313	25.023	26.029	33.228	38.584	15.905	13.179	4.636	9.657	273.276
		8,40%	4,73%	6,17%	19,87%	9,16%	9,52%	12,16%	14,12%	5,82%	4,82%	1,70%	3,53%	
4	Kota Singkawang	5.362	6.669	7.015	19.614	14.344	7.679	8.005	6.642	5.301	4.026	1.015	2.449	88.121
		6,08%	7,57%	7,96%	22,26%	16,28%	8,71%	9,08%	7,54%	6,02%	4,57%	1,15%	2,78%	
5	Kab. Bengkayang	10.186	5.216	4.431	29.293	10.351	10.526	27.659	4.840	2.283	10.600	271	3.917	119.573
		8,52%	4,36%	3,71%	24,50%	8,66%	8,80%	23,13%	4,05%	1,91%	8,86%	0,23%	3,28%	
6	Kab. Sambas	25.949	11.261	16.363	41.718	39.321	23.287	19.498	41.870	11.320	13.369	9.423	5.372	258.751
		10,03%	4,35%	6,32%	16,12%	15,20%	9,00%	7,54%	16,18%	4,37%	5,17%	3,64%	2,08%	
7	Kab. Landak	11.470	5.865	6.262	112.114	14.607	11.030	42.751	5.320	1.504	3.545	126	3.794	218.388
		5,25%	2,69%	2,87%	51,34%	6,69%	5,05%	19,58%	2,44%	0,69%	1,62%	0,06%	1,74%	
8	Kab. Sanggau	13.112	10.628	4.833	78.987	31.283	22.702	27.850	15.426	10.045	12.287	662	10.686	238.501
		5,50%	4,46%	2,03%	33,12%	13,12%	9,52%	11,68%	6,47%	4,21%	5,15%	0,28%	4,48%	
9	Kab. Sekadau	8.289	3.059	4.736	31.710	12.777	9.731	15.054	8.842	5.747	3.087	412	10.742	114.186
		7,26%	2,68%	4,15%	27,77%	11,19%	8,52%	13,18%	7,74%	5,03%	2,70%	0,36%	9,41%	
10	Kab. Sintang	12.170	8.021	8.525	41.468	21.690	33.852	15.129	8.376	9.348	37.845	9.151	27.440	233.015
		5,22%	3,44%	3,66%	17,80%	9,31%	14,53%	6,49%	3,59%	4,01%	16,24%	3,93%	11,78%	
11	Kab. Melawi	4.176	2.193	2.267	22.175	24.372	14.820	12.994	28.738	8.837	10.010	956	7.453	138.991
		3,00%	1,58%	1,63%	15,95%	17,53%	10,66%	9,35%	20,68%	6,36%	7,20%	0,69%	5,36%	
12	Kab. Kapuas Hulu	7.118	7.967	5.855	27.266	8.303	8.920	17.233	5.043	22.642	12.300	2.227	13.020	137.894
		5,16%	5,78%	4,25%	19,77%	6,02%	6,47%	12,50%	3,66%	16,42%	8,92%	1,62%	9,44%	
13	Kab. Ketapang	14.732	12.322	7.429	58.377	52.582	14.546	27.532	20.154	17.146	14.382	2.980	2.085	244.267
		6,03%	5,04%	3,04%	23,90%	21,53%	5,95%	11,27%	8,25%	7,02%	5,89%	1,22%	0,85%	
14	Kab. Kayong Utara	4.386	4.427	2.142	4.045	6.420	8.147	4.379	6.416	5.523	3.325	1.046	1.655	51.911
		8,45%	8,53%	4,13%	7,79%	12,37%	15,69%	8,44%	12,36%	10,64%	6,41%	2,01%	3,19%	
JUMLAH		173.085	120.311	112.542	592.236	300.027	226.660	297.558	216.920	156.715	156.487	40.480	130.233	2.523.254
		6,86%	4,77%	4,46%	23,47%	11,89%	8,98%	11,79%	8,60%	6,21%	6,20%	1,60%	5,16%	
RANK		6	10	11	1	2	4	3	5	7	8	12	9	

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 20. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014**

No	Kabupaten/ Kota	Partai Politik												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	
		Partai NasDe m	PKB	PKS	PDI Perjuang an	Partai GOLKAR	Partai GERIND RA	Partai Demokra t	PAN	PPP	Partai HANURA	PBB	PKPI	
1	Kota Pontianak	33.766	27.400	14.909	34.872	33.211	24.632	19.966	30.255	22.907	24.397	15.267	19.662	301.244
		11,21%	9,10%	4,95%	11,58%	11,02%	8,18%	6,63%	10,04%	7,60%	8,10%	5,07%	6,53%	
2	Kab. Pontianak	12.574	16.655	8.660	13.172	18.425	12.741	14.934	6.637	13.583	8.623	3.845	3.260	133.109
		9,45%	12,51%	6,51%	9,90%	13,84%	9,57%	11,22%	4,99%	10,20%	6,48%	2,89%	2,45%	
3	Kab. Kubu Raya	24.150	21.023	17.429	61.708	32.748	28.887	25.999	20.146	24.711	23.024	2.734	8.777	291.336
		8,29%	7,22%	5,98%	21,18%	11,24%	9,92%	8,92%	6,92%	8,48%	7,90%	0,94%	3,01%	
4	Kota Singkawang	7.771	11.335	6.342	17.803	8.660	7.208	7.761	6.086	6.120	5.953	2.437	4.435	91.911
		8,45%	12,33%	6,90%	19,37%	9,42%	7,84%	8,44%	6,62%	6,66%	6,48%	2,65%	4,83%	
5	Kab. Bengkayang	15.215	6.445	4.205	23.035	11.954	17.290	20.184	5.142	1.347	12.899	95	4.647	122.458
		5,05%	2,14%	1,40%	7,65%	3,97%	5,74%	6,70%	1,71%	0,45%	4,28%	0,03%	1,54%	
6	Kab. Sambas	22.384	8.581	17.138	36.300	36.466	30.060	21.240	37.783	19.545	16.928	10.651	8.034	265.110
		8,44%	3,24%	6,46%	13,69%	13,76%	11,34%	8,01%	14,25%	7,37%	6,39%	4,02%	3,03%	
7	Kab. Landak	25.567	7.581	4.910	66.270	23.218	26.652	22.610	16.259	4.378	9.828	97	12.165	219.535
		11,65%	3,45%	2,24%	30,19%	10,58%	12,14%	10,30%	7,41%	1,99%	4,48%	0,04%	5,54%	
8	Kab. Sanggau	22.421	15.595	3.731	40.860	33.447	28.992	29.398	15.271	11.980	23.926	232	16.927	242.780
		9,24%	6,42%	1,54%	16,83%	13,78%	11,94%	12,11%	6,29%	4,93%	9,86%	0,10%	6,97%	
9	Kab. Sekadau	15.401	3.496	2.015	20.353	8.320	16.241	16.105	8.592	4.683	11.780	563	8.609	116.158
		13,26%	3,01%	1,73%	17,52%	7,16%	13,98%	13,86%	7,40%	4,03%	10,14%	0,48%	7,41%	
10	Kab. Sintang	24.575	19.230	7.812	39.871	24.105	31.724	21.329	14.665	10.066	16.265	9.191	18.332	237.165
		10,36%	8,11%	3,29%	16,81%	10,16%	13,38%	8,99%	6,18%	4,24%	6,86%	3,88%	7,73%	
11	Kab. Melawi	10.156	8.640	6.003	21.842	24.832	13.980	12.453	14.587	7.375	9.354	1.264	9.718	140.204
		7,24%	6,16%	4,28%	15,58%	17,71%	9,97%	8,88%	10,40%	5,26%	6,67%	0,90%	6,93%	
12	Kab. Kapuas Hulu	10.950	5.547	6.786	17.967	19.843	14.644	9.644	10.366	23.112	10.891	782	10.363	140.895
		7,77%	3,94%	4,82%	12,75%	14,08%	10,39%	6,84%	7,36%	16,40%	7,73%	0,56%	7,36%	
13	Kab. Ketapang	17.259	9.725	9.244	50.206	44.519	19.946	22.227	27.028	21.367	27.152	3.070	4.431	256.174
		6,74%	3,80%	3,61%	19,60%	17,38%	7,79%	8,68%	10,55%	8,34%	10,60%	1,20%	1,73%	
14	Kab. Kayong Utara	5.071	6.257	2.841	4.712	6.232	5.516	5.990	4.767	4.912	4.302	2.174	4.006	56.780
		8,93%	11,02%	5,00%	8,30%	10,98%	9,71%	10,55%	8,40%	8,65%	7,58%	3,83%	7,06%	
JUMLAH		173.085	120.311	112.542	592.236	300.027	226.660	297.558	216.920	156.715	156.487	40.480	130.233	2.523.254
		6,86%	4,77%	4,46%	23,47%	11,89%	8,98%	11,79%	8,60%	6,21%	6,20%	1,60%	5,16%	

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

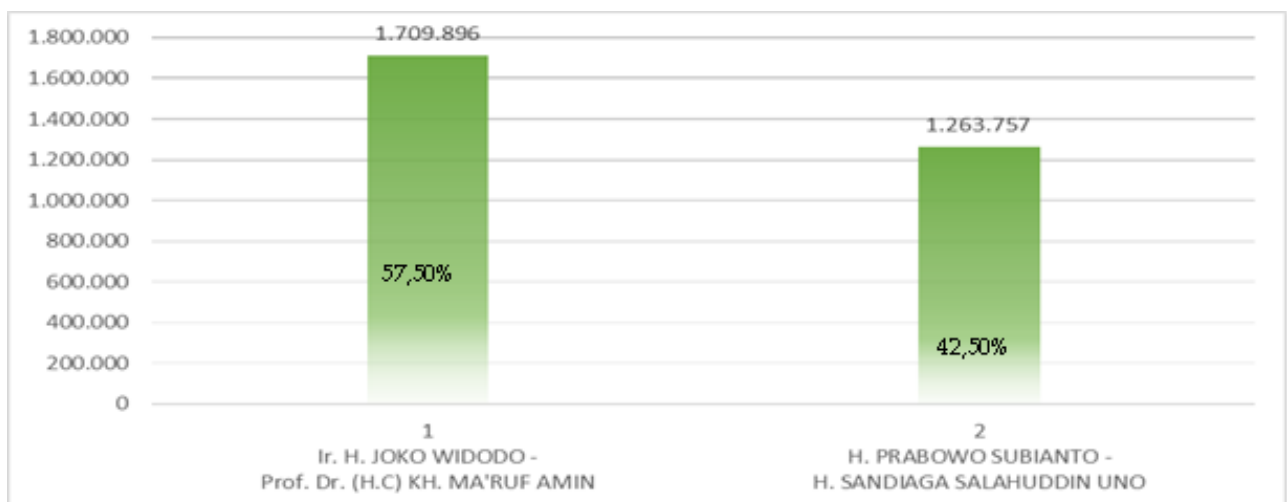
Pemilu Tahun 2019 adalah pemilu pertama kali di Indonesia untuk memilih secara serentak anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berikut hasil perhitungan suara Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 21. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**

No	Kabupaten / Kota	Perolehan Suara Calon				Total Suara				
		1 Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin		2 H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno		Suara Sah		Suara Tidak Sah		Total Suara Sah & Tidak Sah
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Sambas	167.711	55,33%	135.383	44,67%	303.094	97,38%	8.170	2,62%	311.264
2	Mempawah	54.946	35,84%	98.370	64,16%	153.316	97,93%	3.246	2,07%	156.562
3	Sanggau	202.856	75,38%	66.266	24,62%	269.122	98,25%	4.797	1,75%	273.919
4	Ketapang	165.852	57,18%	124.183	42,82%	290.035	97,50%	7.434	2,50%	297.469
5	Sintang	190.595	73,10%	70.138	26,90%	260.733	98,67%	3.503	1,33%	264.236
6	Kapuas Hulu	89.607	59,93%	59.916	40,07%	149.523	97,97%	3.098	2,03%	152.621
7	Bengkayang	107.505	77,99%	30.344	22,01%	137.849	98,31%	2.371	1,69%	140.220
8	Landak	212.961	86,34%	33.702	13,66%	246.663	98,93%	2.677	1,07%	249.340
9	Sekadau	91.565	71,40%	36.675	28,60%	128.240	98,75%	1.617	1,25%	129.857
10	Melawi	81.400	55,78%	64.527	44,22%	145.927	98,28%	2.550	1,72%	148.477
11	Kayong Utara	25.527	39,89%	38.471	60,11%	63.998	95,68%	2.887	4,32%	66.885
12	Kota Pontianak	133.484	36,00%	237.301	64,00%	370.785	98,83%	4.371	1,17%	375.156
13	Kota Singkawang	64.425	56,21%	50.181	43,79%	114.606	98,18%	2.125	1,82%	116.731
14	Kubu Raya	121.462	35,75%	218.300	64,25%	339.762	97,87%	7.410	2,13%	347.172
<b>JUMLAH</b>		<b>1.709.896</b>	<b>57,50%</b>	<b>1.263.757</b>	<b>42,50%</b>	<b>2.973.653</b>	<b>98,14%</b>	<b>54.933</b>	<b>1,81%</b>	<b>3.029.909</b>

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 10. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**



Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 22. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Daerah Pemilihan 1 Tahun 2019**

No.	Calon Anggota DPR	R I N C I A N									Jumlah Akhir	Rank
		Sambas	Mempawah	Ketapang	Bengkayang	Landak	Kayong Utara	Pontianak	Singkawang	Kubu Raya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5.625	1.567	3.672	2.070	1.444	1.173	3.438	1.795	4.099	<b>24.883</b>	6
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.635	5.191	9.941	3.392	2.201	1.733	17.993	3.528	12.078	<b>63.692</b>	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.989	3.464	11.962	7.157	7.136	1.123	15.066	6.591	11.302	<b>73.790</b>	1
4	Partai Golongan Karya	6.568	2.215	10.852	2.632	1.537	1.281	4.133	1.511	5.496	<b>36.225</b>	4
5	Partai Nasdem	3.757	1.097	2.993	2.124	1.652	756	3.559	2.220	3.382	<b>21.540</b>	7
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	605	206	583	327	238	157	487	221	538	<b>3.362</b>	14
7	Partai Berkarya	1.899	874	2.807	1.469	480	422	1.322	513	1.486	<b>11.272</b>	12
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.342	2.403	3.560	1.079	1.028	1.266	14.536	2.490	7.543	<b>39.247</b>	3
9	Partai Persatuan Indonesia	3.171	707	4.455	2.311	1.109	864	1.665	748	1.796	<b>16.826</b>	9
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.581	1.020	3.801	399	568	1.077	3.151	847	2.903	<b>16.347</b>	10
11	Partai Solidaritas Indonesia	583	417	767	356	348	139	3.751	656	1.256	<b>8.273</b>	13
12	Partai Amanat Nasional	3.437	1.088	3.463	543	495	778	3.941	888	3.457	<b>18.090</b>	8
13	Partai Hati Nurani Rakyat	1.794	719	2.681	933	869	2.884	1.627	853	1.377	<b>13.737</b>	11
14	Partai Demokrat	2.745	3.055	3.743	2.504	1.382	1.171	4.532	1.333	4.575	<b>25.040</b>	5
15	Partai Bulan Bintang	944	220	379	119	51	160	846	92	411	<b>3.222</b>	15
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	480	67	192	285	284	387	753	159	388	<b>2.995</b>	16
<b>JUMLAH</b>		<b>57.155</b>	<b>24.310</b>	<b>65.851</b>	<b>27.700</b>	<b>20.822</b>	<b>15.371</b>	<b>80.800</b>	<b>24.445</b>	<b>62.087</b>	<b>378.541</b>	

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 23. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Daerah Pemilihan 2 Tahun 2019**

No.	Calon Anggota DPR	R I N C I A N					Jumlah Akhir	Rank
		Sanggau	Sintang	Kapuas Hulu	Sekadau	Melawi		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5.625	1.567	3.672	2.070	1.444	14.378	4
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.635	5.191	9.941	3.392	2.201	28.360	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.989	3.464	11.962	7.157	7.136	39.708	1
4	Partai Golongan Karya	6.568	2.215	10.852	2.632	1.537	23.804	3
5	Partai Nasdem	3.757	1.097	2.993	2.124	1.652	11.623	8
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	605	206	583	327	238	1.959	14
7	Partai Berkarya	1.899	874	2.807	1.469	480	7.529	11
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.342	2.403	3.560	1.079	1.028	13.412	6
9	Partai Persatuan Indonesia	3.171	707	4.455	2.311	1.109	11.753	7
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.581	1.020	3.801	399	568	8.369	10
11	Partai Solidaritas Indonesia	583	417	767	356	348	2.471	13
12	Partai Amanat Nasional	3.437	1.088	3.463	543	495	9.026	9
13	Partai Hati Nurani Rakyat	1.794	719	2.681	933	869	6.996	12
14	Partai Demokrat	2.745	3.055	3.743	2.504	1.382	13.429	5
15	Partai Bulan Bintang	944	220	379	119	51	1.713	15
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	480	67	192	285	284	1.308	16
<b>JUMLAH</b>		<b>57.155</b>	<b>24.310</b>	<b>65.851</b>	<b>27.700</b>	<b>20.822</b>	<b>195.838</b>	

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 24. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2019**

No.	Calon Anggota DPD	R I N C I A N														Jumlah Akhir	Rank
		Sambas	Mem pah wah	Sang gau	Ketap ang	Sinta ng	Kapu as Hulu	Beng kayan g	Land ak	Seka dau	Mela wi	Kayo ng Utara	Kota Ponti anak	Kota Singk awan g	Kubu Raya		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
21	Abdul Fazri, S.E.	70.308	2.837	4.578	8.229	4.516	1.922	4.336	1.617	1.928	961	2.518	7.694	6.023	7.584	125.051	7
22	Drs. H. Abdul Rahmi	10.937	3.871	6.745	10.769	6.596	2.099	2.856	2.875	9.384	1.651	2.378	28.114	4.528	16.798	109.601	10
23	H. Amri Kalam, S.H., M.H.	13.161	4.409	11.736	14.645	23.720	4.162	4.564	4.284	10.539	71.572	4.057	18.964	5.304	17.711	208.828	5
24	Beni Sulastiyo, S.E.	15.952	8.119	8.909	17.132	9.200	3.335	5.473	2.858	4.597	2.175	5.038	28.431	7.107	25.188	143.514	6
25	Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.	15.501	16.206	50.264	29.873	55.505	10.698	17.752	49.206	24.667	17.553	2.461	60.880	24.635	31.103	406.304	1
26	Erlinawati, S.H., M.AP.	19.752	13.334	11.412	23.966	24.051	78.089	5.608	4.965	6.298	8.986	5.010	30.337	6.624	20.626	259.058	3
27	Glorio Sanen, S.H.	3.791	2.621	18.368	14.269	11.854	5.742	6.796	29.888	5.434	5.472	778	4.069	2.536	5.309	116.927	8
28	dr. Ikke Wisaksono	4.427	16.737	3.524	5.550	3.053	1.265	1.370	1.153	1.873	1.005	1.583	6.951	1.877	5.800	56.168	16
29	Joseph Odillo Oendoen.	4.258	2.674	19.640	11.008	10.324	3.214	8.263	12.606	4.549	2.923	620	6.692	4.576	6.519	97.866	12

No.	Calon Anggota DPD	R I N C I A N															
		Samba s	Mem pa wah	Sang gau	Ketap ang	Sinta ng	Kapu as Hulu	Beng kayan g	Land ak	Seka dau	Mela wi	Kayo ng Utara	Kota Ponti anak	Kota Singk awan g	Kubu Raya	Jumlah Akhir	Rank
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
30	Dr. Khalilah, M.Pd.	10.131	4.395	6.220	9.064	6.227	1.991	3.684	2.962	3.304	1.722	3.857	9.896	4.912	13.774	82.139	14
31	Maria Goreti, S.Sos., M.Si.	6.754	5.383	55.075	23.056	48.299	12.477	18.399	53.142	29.920	14.570	586	6.711	5.019	7.950	287.341	2
32	Drs. H. M. Suronto	1.488	823	1.186	1.904	1.182	1.057	533	593	660	400	608	6.872	774	11.439	29.519	20
33	Muhammad Isa, S.Pd.	12.076	2.335	1.493	2.423	3.888	668	1.399	723	1.286	1.474	1.997	4.073	4.430	4.086	42.351	18
34	Muhammad Saleh	4.182	2.717	2.584	6.516	2.549	971	1.360	1.106	1.351	866	2.080	10.866	2.000	9.586	48.734	17
35	Mujilastuti	5.302	2.081	12.528	7.719	11.267	2.677	31.766	13.749	5.480	2.753	1.103	3.603	4.122	3.782	107.932	11
36	N. CH. Saiyan, S.H., M.H.	1.034	1.014	4.542	1.886	2.444	785	2.133	40.969	2.353	957	282	2.916	691	2.762	64.768	15
37	Hj. Rubaeti Erlita, S.Sos.I., S.H.	50.607	2.852	3.389	19.990	2.955	1.800	3.797	1.885	1.464	989	3.757	8.045	4.943	7.468	113.941	9
38	Prof. Dr. H. Samion AR, M.Pd.	9.522	4.003	20.829	6.603	3.986	3.654	1.880	2.913	3.210	2.314	2.434	18.606	2.281	14.422	96.657	13
39	H. Sukiryanto	1.235	21.684	4.751	27.198	9.067	2.439	1.792	7.061	1.910	2.135	5.395	50.062	4.937	81.271	220.937	4
40	Yudi Aldiyansyah, S.E.	4.741	1.226	1.847	3.567	1.843	873	829	616	806	531	1.022	7.827	1.417	3.957	31.102	19
JUMLAH		265.159	119.321	249.620	245.367	242.526	139.918	124.590	235.171	121.013	141.009	47.564	321.609	98.736	297.135	2.648.738	

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 25. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019**

No.	Calon Anggota DPRD Provinsi	R I N C I A N								Jumlah Akhir	Rank
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	DAPIL 7	DAPIL 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18	19
1	Partai Kebangkitan Bangsa	22.941	32.976	15.330	27.622	3.955	23.584	33.987	19.408	179.803	6
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	44.952	49.117	25.402	26.555	9.771	32.831	60.662	38.215	287.505	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	47.522	80.568	49.173	60.249	143.369	94.184	111.755	56.651	643.471	1
4	Partai Golongan Karya	32.428	68.155	25.391	30.530	18.110	38.548	35.754	54.507	303.423	2
5	Partai Nasdem	30.868	29.057	30.952	24.720	21.282	23.980	53.179	21.740	235.778	5
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.731	2.077	1.118	839	359	1.928	3.489	833	12.374	16
7	Partai Berkarya	4.325	5.374	4.466	3.690	1.088	6.414	11.431	6.714	43.502	13
8	Partai Keadilan Sejahtera	40.564	32.891	10.266	25.100	2.956	4.511	11.104	11.461	138.853	9
9	Partai Persatuan Indonesia	5.727	6.217	11.272	8.034	4.704	19.950	30.586	16.116	102.606	11
10	Partai Persatuan Pembangunan	26.936	20.054	3.849	8.894	1.755	5.265	35.147	21.653	123.553	10
11	Partai Solidaritas Indonesia	10.232	3.633	1.248	596	1.178	6.556	3.779	1.505	28.727	14
12	Partai Amanat Nasional	22.567	20.589	8.828	25.909	992	26.892	42.574	22.867	171.218	7
13	Partai Hati Nurani Rakyat	11.905	26.528	13.355	13.434	8.115	13.354	38.060	15.819	140.570	8
14	Partai Demokrat	17.192	66.388	26.534	20.164	19.987	50.113	44.595	25.673	270.646	4
19	Partai Bulan Bintang	4.633	1.183	175	2.653	0	299	2.205	1.415	12.563	15
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	15.107	3.616	3.079	2.758	2.552	31.478	10.382	689	69.661	12
JUMLAH		339.630	448.423	230.438	281.747	240.173	379.887	528.689	315.266	2.764.253	

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota merupakan tolak ukur strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrument terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasinya, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 16 kali dengan beragam jenis Pemilu yang dilaksanakannya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan Pemilu di Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 26. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat**

No.	Tahun	Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah
1.	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2.	2005	Pilkada Kab. Bengkayang, Kab. Sekadau, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu, dan Kab. Ketapang.
3.	2006	Pilkada Kab. Sambas dan Kab. Landak.
4.	2007	Pilkada Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang.
5.	2008	Pilkada Kab. Kayong Utara, Kota Pontianak, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, dan Kab. Sanggau.
6.	2009	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7.	2010	Pemilukada Kab. Bengkayang, Kab. Sekadau, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu, dan Kab. Ketapang.
8.	2011	Pemilukada Kab. Sambas dan Kab. Landak.
9.	2012	Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang.
10.	2013	Pemilukada Kab. Kayong Utara, Kota Pontianak, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, dan Kab. Sanggau.
11.	2014	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
12.	2015	Pilkada Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Sekadau, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu dan Kab. Ketapang.
13.	2017	Pilkada Kota Singkawang dan Kab. Landak.
14.	2018	Pemilihan Serentak Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, Kab. Sanggau, Kab. Kayong Utara.
15.	2019	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
16.	2020	Pemilihan Serentak Kepala Daerah di Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Sekadau, Kab. Melawi, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kab/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

---

### A.3. Sejarah Terbentuknya Satuan Kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat



Sejarah dan perkembangan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentu tidak dapat terlepas dari sejarah KPU Republik Indonesia itu sendiri. Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah.

Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, KPU harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, pada Pasal 20 a "Di Propinsi, Kabupaten dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum." dan 20 B "Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai tugas membantu Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Propinsi, Kabupaten, dan Kota". Sejalan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002, dan maka terbentuklah Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 112 Pontianak, yang mempunyai tugas memberikan memfasilitasi pelaksanaan Pemilu di Kalimantan Barat dengan terpilihnya Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode

2003-2008 sesuai Keputusan KPU Nomor 153 Tahun 2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka sesuai struktur nomenklatur Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berubah menjadi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan sekarang.

#### A.4. Perkembangan Struktur Kepemimpinan dan Pencapaian Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat

Perkembangan struktur kepemimpinan KPU Provinsi Kalimantan Barat dimulai sejak terbentuknya Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang di pimpin oleh Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2002 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, maka terbentuklah KPU dengan keanggotaan berjumlah 11 (sebelas) orang, dan sebagai Ketua KPU adalah Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, M.A. dimana KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum yang independen dan non partisan, berkedudukan di Ibukota Negara.

Selanjutnya melalui Keputusan KPU Nomor 153 Tahun 2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, diangkatlah 5 (lima) orang Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat periode 2003-2008.

Periode Pemerintahan berikutnya, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011, dimana keanggotaan KPU RI pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Anggota KPU berjumlah lima (5) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Adapun untuk KPU Provinsi Kalimantan Barat secara singkat Periode Kepemimpinan Anggota KPU di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 27. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2003-2008**

Periode 2003 - 2008		
1.	Aida Mochtar, S.Ag., M.Hum.	Ketua KPU
2.	Nazirin, S.H.	Anggota KPU
3.	Muhamad Budi, S.T.	Anggota KPU
4.	Drs. Patrisius Baringan	Anggota KPU
5.	R. Epesus Nyarong, S.H., M.H.	Anggota KPU

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 28. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2008-2013**

<b>Periode 2008 - 2013</b>		
1.	Drs. Ahmad Rabi'ul Muzamil, M.Si.	Ketua KPU
2.	Umi Rifdiyawaty, S.H., M.H.	Anggota KPU
3.	DR. Sofiati	Anggota KPU
4.	Drs. Delfinus	Anggota KPU
5.	Muhamad Isa, S.Pd.	Anggota KPU

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 29. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018**

<b>Periode 2013 - 2018</b>		
1.	Umi Rifdiyawaty, S.H., M.H.	Ketua KPU
2.	Viryan Azis, S.E., M.M.	Anggota KPU
3.	Drs. Delfinus, M.M.	Anggota KPU
4.	Kasiono, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU
5.	Misrawi, S.Sos.I.	Anggota KPU

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

Seiring dengan berjalannya periode kerja Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat, salah satu anggotanya lolos menjadi anggota KPU RI periode 2017 - 2022 yaitu Viryan Azis, S.E., M.M. Dengan lolosnya Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat menjadi Anggota KPU RI, diwajibkan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, yang kemudian ditetapkan Dra. Theresia Masyono Mungaris tepat pada tanggal 29 Mei 2017 dilantik menjadi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018. Hal tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kalimantan Barat yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kab. Sanggau, dan Kab. Kayong Utara serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak di Indonesia.

**Tabel 30. Perubahan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018**

<b>Periode 2013 - 2018</b>		
1.	Umi Rifdiyawaty, S.H., M.H.	Ketua KPU
2.	Drs. Delfinus, M.M.	Anggota KPU
3.	Kasiono, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU
4.	Misrawi, S.Sos.I	Anggota KPU
5.	Dra. Theresia Masyono Mungaris	Anggota KPU

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

Dengan berakhirnya masa periode 2013-2018 Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, maka telah dilantik Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 :

**Tabel 31. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023**

<b>Periode 2018-2023</b>		
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU
3.	Trenggani S.Pd.	Anggota KPU
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

Pada bulan Mei 2018, Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat dilantik, sehari setelah pelantikan, Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan Rapat Pleno pertama, dengan agenda pemilihan ketua dan pembagian tugas lainnya secara tertutup. Hasilnya, lima anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat memutuskan Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu Rapat Pleno juga menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 61/HK.03-1-Kep/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 - 2023.

**Tabel 32. Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 -2023**

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Ketua Wakil	Hukum
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. Zainab, S.P.	Ketua Wakil	Teknis
3.	Mujiyo, S.Pd. Trenggani, S.Pd.	Ketua Wakil	Umum, Keuangan dan Logistik
4.	Trenggani, S.Pd. Mujiyo, S.Pd.	Ketua Wakil	Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
5.	Zainab, S.P. Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua Wakil	Perencanaan dan data

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 33. Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 -2023**

No.	Nama	Koordinator Wilayah
1.	Ramdan, S.Pd., M.Pd.	Kota Singkawang dan Kab. Ketapang
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, dan Kab. Melawi
3.	Trenggani, S.Pd.	Kab. Kubu Raya, Kab. Landak, dan Kab. Kapuas Hulu
4.	Mujiyo, S.Pd.	Kota Pontianak, Kab. Kayong Utara, dan Kab. Sanggau
5.	Zainab, S.P.	Kab. Mempawah, Kab. Sekadau, dan Kab. Sintang

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

Dalam perjalanannya salah satu anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas negara, yang mengakibatkan PAW anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023, adapun PAW tersebut diambil dari calon anggota KPU Provinsi yang ditetapkan masuk ke 10 besar, dan ditetapkan dari urutan ke 6 yaitu Lomon, S.Sos. yang menjadi Anggota PAW KPU Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023.

**Tabel 34. Perubahan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023**

No	Nama	Jabatan
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU
3.	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 56/HK.03-1-Kep/61/Prov/X/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03-1-Kep/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023, susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 35. Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023**

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Ramdan, S.Pd., M.Pd. Mujiyo, S.Pd.	Ketua Wakil	Keuangan Umum, Logistik Dan Rumah Tangga
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. Zainab, S.P.	Ketua Wakil	Teknis Penyelenggara
3.	Lomon, S.Sos. Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Ketua Wakil	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Zainab, S.P. Lomon, S.Sos.	Ketua Wakil	Perencanaan, Data, dan Informasi
5.	Mujiyo, S.Pd. Ramdan, S.Pd., M.Pd.	Ketua Wakil	Hukum dan Pengawasan

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 36. Perubahan Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023**

No.	Nama	Koordinator Wilayah
1.	Ramdan, S.Pd., M.Pd.	Kota Singkawang dan Kab. Ketapang
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, dan Kab. Melawi
3.	Mujiyo, S.Pd.	Kota Pontianak, Kab. Kayong Utara, dan Kab. Sanggau
4.	Zainab, S.P.	Kab. Mempawah, Kab. Sekadau, dan Kab. Sintang
5.	Lomon, S.Sos.	Kab. Kubu Raya, Kab. Landak, dan Kab. Kapuas Hulu

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan di Kalimantan Barat diikuti oleh 16 (enam belas) partai peserta Pemilu yang terdiri dari:

**Gambar 2. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019**



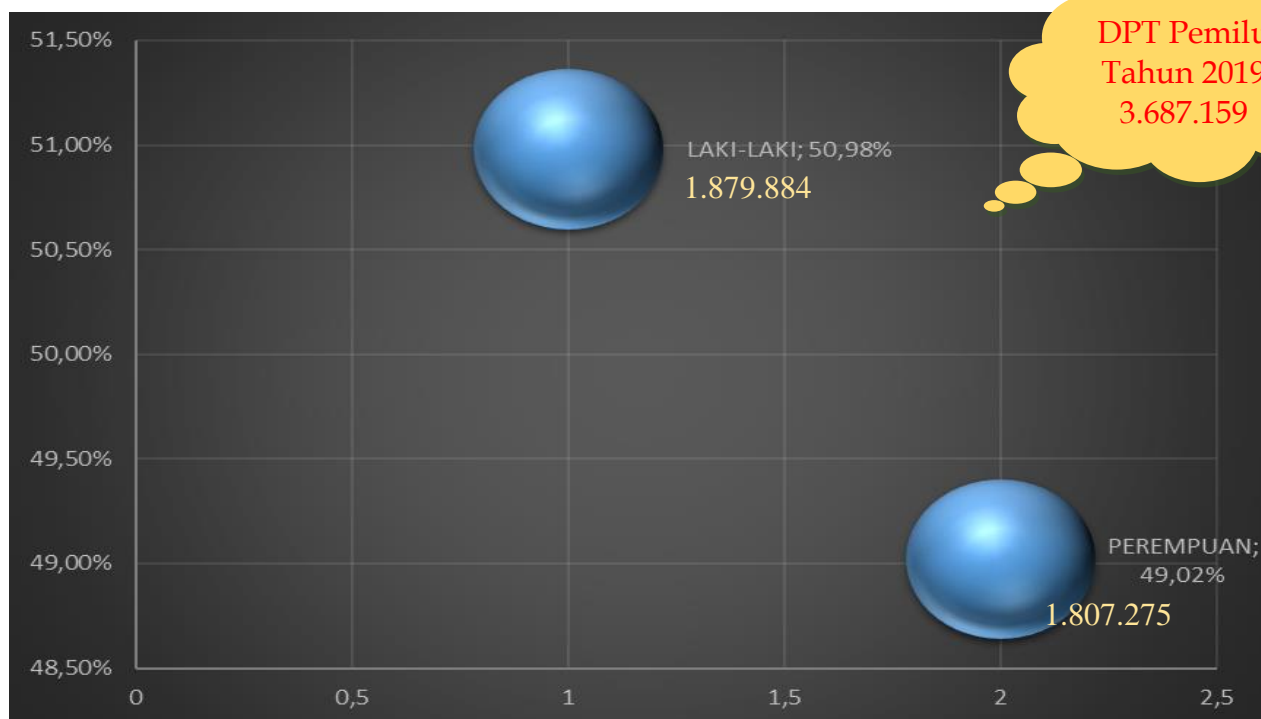
Di Kalimantan Barat, Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar **3.687.159** jiwa, dengan Pemilih berjenis Kelamin Laki-laki **1.879.884** jiwa dan Pemilih berjenis Kelamin Perempuan **1.807.275** Jiwa dengan rincian:

**Tabel 37. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat**

No.	Kab./Kota	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1.	Kab. Bengkayang	92.924	86.082	179.006
2.	Kab. Kapuas Hulu	91.159	87.776	178.935
3.	Kab. Kayong Utara	41.346	39.424	80.770
4.	Kab. Ketapang	193.146	180.882	374.028
5.	Kota Pontianak	226.757	232.132	458.889
6.	Kota Singkawang	80.921	79.832	160.753
7.	Kab. Kubu Raya	213.194	208.858	422.052
8.	Kab. Landak	144.041	130.900	274.941
9.	Kab. Melawi	82.267	78.904	161.171
10.	Kab. Mempawah	95.445	93.374	188.819
11.	Kab. Sambas	217.630	211.701	429.331
12.	Kab. Sanggau	171.392	159.400	330.792
13.	Kab. Sekadau	78.272	74.014	152.286
14.	Kab. Sintang	151.390	143.996	295.386
<b>TOTAL</b>		<b>1.879.884</b>	<b>1.807.275</b>	<b>3.687.159</b>

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 11. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan**



Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

Dari hasil perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 didapat total Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 65 Orang dengan komposisi jumlah Laki-laki sebanyak 59 Orang dan Perempuan sebanyak 6 Orang, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 38. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1**

No.	Partai Politik	No. Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	ROBY NAZARUDIN, S.H.	11.189	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	H. ISHAK ALI AL MUTHAHAR, S.SOS., M.SI.	17.281	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	PAULUS ANDY MURSALIN, S.E., M.M.	16.127	1
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	ZULKARNAEN SIREGAR, S.H.	9.775	1
5.	PARTAI NASDEM	1	MICHAEL YAN SRIWIDODO, S.E., M.M.	11.893	1
6.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	H. ARIF JONI P, S.T., M.T.	20.371	1
7.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	H. MAD NAWIR	12.363	1
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	DR. ARDIANSYAH, S.H., M.H.	7.965	1

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 39. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 2**

No.	Partai Politik	No. Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	H. IRSAN S.Ag., M.H.	11.017	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	YULIANA, A.Md.	12.350	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	MEISKE ANGGRAINY, S.Sos., M.M.	17.234	1
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	BAMBANG GANEFO PUTRA, S.E.	16.887	2
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ERRY IRIANSYAH, S.T.	12.842	2
6.	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	ARIEF RINALDI, S.T.	26.487	1
7.	PARTAI NasDem	1	SYARIF AMIN MUHAMMAD, A.Md.	16.214	1
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. FATAHILLAH ABRAR, S.Ag., M.Si.	15.318	1
9.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	10	SUIB, S.E.	10.351	1
10.	PARTAI DEMOKRAT	1	Drs. AFFANDIE AR	14.592	2
11.	PARTAI DEMOKRAT	2	ERMIN ELVIANI, S.H.	38.261	1

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 40. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 3**

No.	Partai Politik	No. Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	ALEKSANDER, S.Ag.	5.208	1
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.	17.290	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	ELIAS AJAN	5.836	2
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	DR. H. EDY R. YACOUN, M.Si.	6.881	1
5.	PARTAI NasDem	5	SUDIANTONO	9.588	1
6.	PARTAI DEMOKRAT	6	NENENG, M.Sos.	12.089	1

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 41. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 4**

No.	Partai Politik	No. Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.P.H.	17.765	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A.	13.119	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	DARSO	14.736	1
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.	15.245	1
5.	PARTAI NASDEM	2	H. SUBHAN NUR	17.192	1
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	SABIRIN, S.P.	8.461	1
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	TONY KURNIADI, S.T., M.Si.	7.685	1
8.	PARTAI DEMOKRAT	1	MUHAMMAD ISYA, S.H.	7.634	1

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 42. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5**

No.	Partai Politik	No. Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	MINSEN, S.H.	28.527	2
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	TAPANUS, S.H., M.H.	15.529	3
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	ANGELINE FREMALCO, S.H.	76.497	1
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	RAMLI RAMA	10.878	4
5.	PARTAI NASDEM	5	SUMADI	10.608	1

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 43. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6**

No.	Partai Politik	No. Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7	COK HENDRI RAMAPON, S.Sos.	6.599	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	MARTINUS SUDARNO, S.H.	18.564	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	MUSA, S.E.	12.785	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	FRANSISKUS ASON, S.P.	13.853	1
5	PARTAI NASDEM	1	FRANSISKUS SUWONDO, S.E.	7.834	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	MUHAMMAD, S.Sos.	8.749	1
7	PARTAI DEMOKRAT	4	ARON, S.H.	14.964	1
8	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2	MARTEN LUTER, S.Sos.	14.402	1

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 44. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7**

No.	Partai Politik	No. Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUHAMMAD RIZKA WAHAB	9.784	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	GREGORIUS HERKULANUS BALA	16.867	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	M. KEBING L	19.732	2
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	YOHANES RUMPAK, S.Pd., M.M.	56.007	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H. USMANDY S., M.Si.	12.123	1
6	PARTAI NASDEM	7	TERRY IBRAHIM, S.Sos., M.M.	11.724	1
7	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	YULIANUS ASRONI, S.E.	10.421	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	Drs. BUDI BASADI	8.982	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	RITAUDIN, S.E.	9.439	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	SUYANTO TANJUNG, S.Sos., M.Si.	18.093	1
11	PARTAI DEMOKRAT	1	SIMON FETRUS	9.673	1

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 45. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 8**

No.	Partai Politik	No. Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUHAMMAD THOHIR, S.Ag.	7.862	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	HERONIMUS	10.677	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	THOMAS ALEKSANDER, S.Sos., M.Si.	13.052	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	HJ. SUMA JENNY HERYANTI, S.H., M.H.	20.307	1
5	PARTAI NASDEM	5	KHO SUSANTI, S.Pd.	6.163	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. MIFTAH, S.H.I	7.733	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	YULIANI	7.276	1
8	PARTAI DEMOKRAT	4	MASDAR, S.Pd., M.Si.	7.193	1

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

Calon-calon yang sudah terpilih pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tabel-tabel di atas, tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tersebut. Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, partisipasi masyarakat pada setiap Pemilu maupun

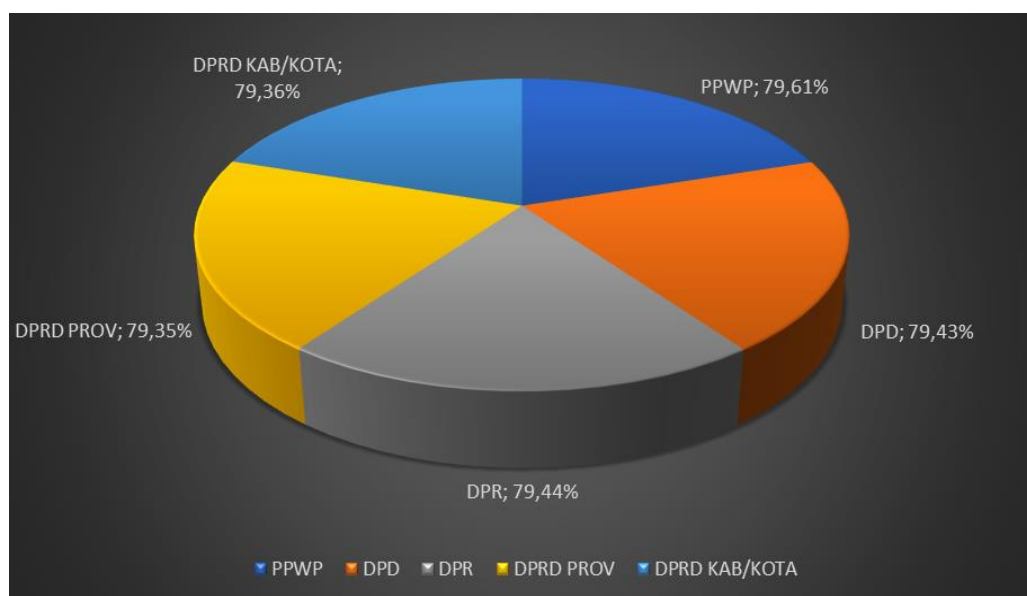
Pemilihan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Dibawah ini adalah persentase data partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah terakhir yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 46. Persentase Partisipasi Pemilih di Provinsi Kalimantan Barat Pemilu Tahun 2019**

No.	Kabupaten/Kota	Pemilihan				
		PPWP	DPD	DPR	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA
1	Kota Pontianak	78,20%	77,88%	77,80%	77,64%	77,61%
2	Kab. Mempawah	79,90%	79,73%	79,71%	79,66%	79,80%
3	Kab. Kubu Raya	79,11%	79,03%	79,00%	78,86%	78,82%
4	Kab. Bengkayang	76,36%	76,24%	76,28%	76,24%	76,31%
5	Kota Singkawang	69,84%	69,47%	69,48%	69,25%	69,16%
6	Kab. Sambas	71,23%	71,15%	71,13%	71,03%	70,97%
7	Kab. Landak	89,51%	89,51%	89,85%	89,86%	90,22%
8	Kab. Sanggau	79,86%	79,79%	79,78%	79,73%	79,66%
9	Kab. Sekadau	83,86%	83,73%	83,71%	83,66%	83,70%
10	Kab. Sintang	86,70%	86,48%	86,45%	86,44%	86,37%
11	Kab. Kapuas Hulu	82,95%	82,58%	82,51%	82,51%	82,41%
12	Kab. Melawi	90,91%	90,96%	90,95%	90,95%	90,99%
13	Kab. Ketapang	76,22%	75,98%	75,98%	75,92%	75,91%
14	Kab. Kayong Utara	78,64%	78,11%	78,07%	77,81%	77,69%
<b>JUMLAH</b>		<b>79,61%</b>	<b>79,43%</b>	<b>79,44%</b>	<b>79,35%</b>	<b>79,36%</b>

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 12. Persentase Partisipasi Pemilih di Provinsi Kalimantan Barat Pemilu Tahun 2019**



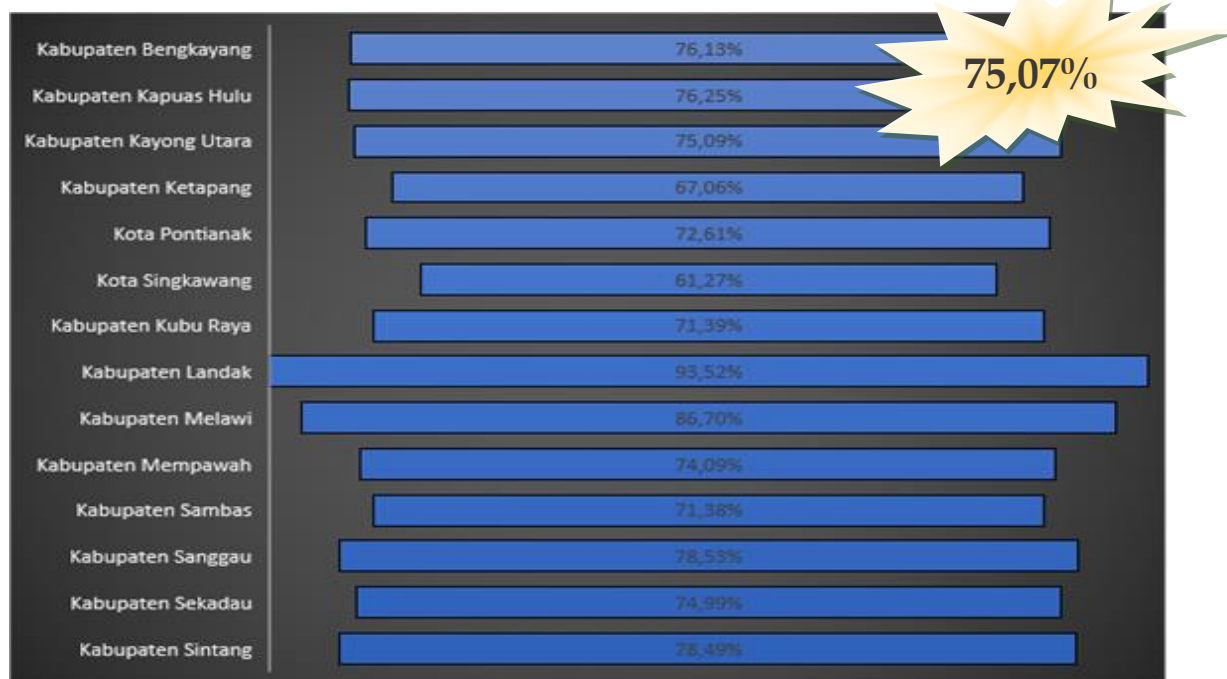
Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 47. Persentase Partisipasi Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018**

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Masyarakat (%)
1	Kabupaten Bengkayang	76,13%
2	Kabupaten Kapuas Hulu	76,25%
3	Kabupaten Kayong Utara	75,09%
4	Kabupaten Ketapang	67,06%
5	Kota Pontianak	72,61%
6	Kota Singkawang	61,27%
7	Kabupaten Kubu Raya	71,39%
8	Kabupaten Landak	93,52%
9	Kabupaten Melawi	86,70%
10	Kabupaten Mempawah	74,09%
11	Kabupaten Sambas	71,38%
12	Kabupaten Sanggau	78,53%
13	Kabupaten Sekadau	74,99%
14	Kabupaten Sintang	78,49%
<b>Jumlah Akhir</b>		<b>75,07%</b>

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

**Grafik 13. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018**



Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

KPU Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2015-2019 (Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 8/Kpts/KPU-Prov-019/2016). Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
  - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
  - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
  - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
  - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
  - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 48. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Bulan Januari s/d Bulan Desember)	Capaian (%)	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4) * 100%	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019, tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan di Tahun 2019 adalah Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus (DPTb dan DPK), Pembentukan KPPS, Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Bulan Januari s/d Bulan Desember)	Capaian (%)	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4) * 100%	(7)
						dan Wakil Presiden, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemungutan dan Penghitungan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu, dan Penetapan Hasil Pemilu.  Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain seluruh tahapan berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku.
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada	77.5%	79,61%	102,72%	Dari data jumlah pemilih di 14 KPU Kabupaten/Kota yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019. Dari jumlah pemilih sebanyak 3.806.129 Pemilih, terdapat 3.029.909 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sehingga partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah sebesar 79,61%.
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	80,75%	107,67%	Dari data jumlah pemilih perempuan di 14 KPU Kabupaten/Kota yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019. Dari jumlah pemilih perempuan sebanyak 1.864.745 Pemilih, terdapat 1.505.732 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sehingga partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah sebesar 80,75%.
		Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	49,56%	66,08%	Dari data jumlah pemilih disabilitas di 14 KPU Kabupaten/Kota yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019. Dari jumlah pemilih disabilitas sebanyak 8.654 Pemilih, terdapat 4.289 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sehingga partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah sebesar 49,56%.
		Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang	80%	79,22%	99,02%	Dari data jumlah pemilih yang Terdaftar dalam DPT di 14 KPU Kabupaten/Kota yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Bulan Januari s/d Bulan Desember)	Capaian (%)	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4) * 100%	(7)
		menggunakan hak pilihnya				Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019. Dari jumlah pemilih yang Terdaftar dalam DPT sebanyak 3.687.159 Pemilih, terdapat 2.920.956 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sehingga partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebesar 79,22%.
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%	Dari target 95% persentase KPU Provinsi dan 14 (empat belas) KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik, realisasinya adalah sebesar 100% dikarenakan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 berlangsung aman dan tanpa konflik.
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3,57%	81%	<p>Jumlah seluruh penyelenggara Pemilu se-Kalimantan Barat adalah 280 orang, terdiri dari 75 orang komisioner dan 205 orang pegawai kesekretariatan. Pada tahun 2019 terdapat pelanggaran kode etik yang di duga dilakukan oleh 15 (lima belas) orang Penyelenggara Pemilu, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 (lima) orang Penyelenggara Pemilu di KPU Provinsi Kalimantan Barat yaitu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan Pengaduan Nomor: 341-P/L-DKPP/IX/2019 dan Perkara Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Adapun obyek sengketa berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa terjadi perubahan Perolehan suara di Dapil Kalimantan Barat 6 untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., S.E., M.Th., Caleg Nomor Urut 1 dan Caleg lain atas nama Cok Hendri Ramapon, S.Sos. Nomor Urut 7 di Sembilan belas desa Kecamatan Meliau yaitu desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombak, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, dan Kuala Rosan.</li> <li>2. Pengaduan ini tidak berlanjut dikarenakan dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor.</li> </ol> </li> <li>- 5 (lima) orang Penyelenggara Pemilu di KPU Provinsi Kalimantan Barat yaitu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat serta 5 (lima) orang Penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Landak yaitu Teradu I Herkulanus Yacobus selaku Ketua merangkap Anggota, Teradu II Reni Yulianti selaku Anggota, Teradu III Mikael selaku Anggota, Teradu IV Lisanto selaku Anggota dan Teradu V M. Tarmizi selaku Anggota KPU Kabupaten Landak dengan pengaduan Nomor: 224-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan</li> </ul>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Bulan Januari s/d Bulan Desember)	Capaian (%)	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4) * 100%	(7)
						<p>Perkara Nomor : 211-PKE-DKPP/VIII/2019. Adapun objek sengketa berupa :</p> <p>1.Teradu I s.d Teradu V tidak melakukan perbaikan DAA1-DPR di 6 (enam) Kecamatan secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan Putusan Bawaslu Nomor: 13/LP/PL/ADM/RI/ 00.00/V/2019.</p> <p>2.Bahwa Teradu I s.d Teradu V tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>KPU Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan putusan DKPP dengan Merehabilitasi masing-masing nama baik Teradu I Herkulanus Yacobus selaku Ketua merangkap Anggota, Teradu II Reni Yulianti selaku Anggota, Teradu III Mikael selaku Anggota, Teradu IV Lisanto selaku Anggota dan Teradu V M. Tarmizi selaku Anggota KPU Kabupaten Landak.</p> <p>- 5 (lima) orang Penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Melawi yaitu Teradu I Dedi Suparjo selaku Ketua merangkap Anggota, Teradu II Irfan Affandi selaku Anggota, Teradu III Wenefrida Kartika Waty selaku Anggota, Teradu IV Airin Fitriansyah selaku Anggota dan Teradu V Abdul Kasim selaku Anggota KPU Kabupaten Melawi dengan pengaduan Nomor: 239-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor : 226-PKE-DKPP/VIII/2019. Adapun objek sengketa berupa :</p> <p>1.KPU Kabupaten Melawi diduga telah melakukan perbuatan yang bersifat diskriminasi, tidak transparan serta tidak berkeadilan;</p> <p>2.KPU Kabupaten Melawi berdasarkan kewenangannya yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi keberatan dalam Formulir DB2-KPU dan hanya melakukan pencatatan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh para peserta Pemilu yang dituangkan pada Berita Acara Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Melawi</p> <p>3.KPU Kabupaten Melawi diduga telah melakukan pembiaran dan tidak menjunjung tinggi rasa keadilan dalam proses Pemilu di Kabupaten Melawi;</p> <p>KPU Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan putusan DKPP dengan memberikan Peringatan kepada Teradu</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Bulan Januari s/d Bulan Desember)	Capaian (%)	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4) * 100%	(7)
						<p>I Dedi Suparjo selaku Ketua merangkap Anggota, Teradu II Irfan Affandi selaku Anggota, Teradu III Wenefrida Kartika Waty selaku Anggota, Teradu IV Airin Fitriansyah selaku Anggota dan Teradu V Abdul Kasim selaku Anggota KPU Kabupaten Melawi.</p> <p>- 5 (lima) orang Penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Landak yaitu Teradu I Herculanus Yacobus selaku Ketua merangkap Anggota, Teradu II Reni Yuliati selaku Anggota, Teradu III Mikael selaku Anggota, Teradu IV Lisanto selaku Anggota dan Teradu V M. Tarmizi selaku Anggota KPU Kabupaten Landak dengan pengaduan Nomor : 181-P/L-DKPP/VI/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor : 175-PKE-DKPP/VII/2019. Adapun objek sengketa berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Teradu tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Landak;</li> <li>2.Mencoret tebal/mengubah angka-angka perolehan suara pada Formulir C1 DPRD Kab/Kota sehingga terjadi penambahan/ pengurangan perolehan suara Partai dan/ atau Peserta Pemilu.</li> </ol> <p>KPU Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan putusan DKPP dengan memberikan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Reni Yuliati Anggota KPU Kabupaten Landak dan memberikan Sanksi Peringatan kepada Teradu I Herculanus Yacobus Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Landak, Teradu III Mikael, Teradu IV Lisanto, dan Teradu M. Tarmizi masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Landak.</p> <p>Sehingga pada Tahun 2019 dari 15 (lima belas) orang Penyelenggara Pemilu yang di duga melakukan pelanggaran kode etik, terdapat 10 (sepuluh) orang penyelenggara pemilu di Kalimantan Barat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik yaitu 5 (lima) orang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Melawi dan 5 (lima) orang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Landak.</p>
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	86%	69,23%	80,50%	<p>Terdapat 13 permasalahan/ kasus hukum selama Tahun 2019. Dari 13 kasus hukum yang dihadapi, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat berhasil memenangkan 9 kasus dan 4 kasus kalah.</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Bulan Januari s/d Bulan Desember)	Capaian (%)	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4) * 100%	(7)
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2019 belum diumumkan oleh KemenPAN dan RB. Untuk itu, pada indikator ini akan diukur dengan menggunakan nilai yang tercapai pada tahun 2018. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 yang dilakukan oleh Menteri PAN dan RB terhadap KPU RI menunjukkan bahwa KPU memperoleh predikat BB (sangat baik).
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	WDP	Pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2019 masih menggunakan nilai capaian tahun 2018, yaitu WDP, dikarenakan penilaian tahun 2019 belum keluar dari Menteri Keuangan. Dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 82,56% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37	Pengukuran capaian kinerja terhadap Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU di Tahun 2019 masih menggunakan Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU di Tahun 2018 yaitu 70,03 (tujuh nol koma nol tiga). Sehingga capaian kinerja untuk Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebesar 93,37%.
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	99	89,90	90,81	Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui kuesioner self assessment questionnaire (SAQ) kepada badan publik, KPU meraih penghargaan untuk kategori Badan Lembaga Non Struktural Menuju Informatif dengan capaian nilai 80-89,9. Sehingga Pencapaian Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU di Tahun 2019 adalah 90,81%.

Sumber: PPID KPU Provinsi Kalimantan Barat

#### A.5. Aspirasi Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Barat

Aspirasi masyarakat menjadi referensi utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan sistem pelayanan publik. KPU Provinsi Kalimantan Barat adalah penyelenggara pemilu di Provinsi bertugas melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang secara berkesinambungan terus mendukung kebijakan dan implementasi pelayanan publik. KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dinamis. Dengan menempatkan publik sebagai pusat dari penyelenggaraan layanan, inovasi pelayanan publik guna melayani

kebutuhan dan aspirasi masyarakat terus ditingkatkan. KPU Provinsi Kalimantan Barat berusaha membaca, menjawab keinginan, serta harapan masyarakat, sehingga pelayanan publik di KPU Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing telah dilakukan setiap tahun melalui evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan melalui regulasi dan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. **Jujur**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. **Mandiri**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. **Adil**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. **Akuntabel**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. **Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

6. **Profesional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. **Efektif**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan umum**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. **Asas langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. **Asas umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. **Asas bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. **Asas rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. **Asas jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta;
6. **Asas adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## **B. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024**

Untuk melaksanakan Rencana Strategis KPU Provinsi Periode 2020-2024 yang menjadi lingkup kewenangan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentunya KPU Provinsi Kalimantan Barat memiliki Potensi, Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang harus dianalisis tersendiri walaupun dalam garis besarnya Potensi, Permasalahan, Peluang dan ancaman yang dimiliki KPU RI juga dimiliki KPU Provinsi dan Kab. sebagai lembaga yang bersifat hierarkis.

Tentunya tugas, fungsi, kewenangan KPU Provinsi harus terlebih dahulu dijabarkan jika ingin mendapatkan analisis Potensi dan Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang komprehensif.

---

### **B.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Provinsi Kalimantan Barat**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

**Gambar 3. Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat Jalan Subarkah No. 1 Pontianak**



Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi meliputi :

**Tugas KPU Provinsi**

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar Pemilih dan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KPU Provinsi berwenang:**

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

- terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KPU Provinsi berkewajiban :**

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi meliputi :

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;

- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- g. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
  - 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, KPU Provinsi wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

## B.2. Potensi dan Permasalahan KPU Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU adalah “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Dapat Menjamin Pelaksanaan Hak Politik Masyarakat” yang dipengaruhi oleh 7 (tujuh) Aspek/Dimensi organisasi yaitu :

1. Aspek Kelembagaan;
2. Aspek Sumber Daya Manusia;
3. Aspek Kepemimpinan;
4. Aspek Perencanaan dan Penganggaran;
5. Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi;
7. Aspek Hubungan Dengan *Stakeholders*.

Penjabaran dari potensi/peluang/kekuatan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum yang juga merupakan potensi/kekuatan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (S6).
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang baik pada Pemilihan Tahun 2020 walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Masih terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).

8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

---

### B.3. Peluang yang akan dihadapi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan Renstra Periode 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat juga dihadapkan pada sejumlah peluang yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun **peluang** dan tantangan tersebut adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasiujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

---

### B.4. Tantangan/Ancaman yang akan dihadapi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan Renstra Periode 2020-2024

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa **ancaman** yang harus diatasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).

2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kalimantan Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kalimantan Barat belum optimal mendukung Pemilu. 463 Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat belum memiliki akses internet (Berdasarkan Buku Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS Kalimantan Barat Tahun 2021) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

---

## B.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Provinsi Kalimantan Barat, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Provinsi Kalimantan Barat, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata - kata, kategori - kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian - kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 49. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Provinsi Kalimantan Barat**

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (S6).</li> <li>7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</li> <li>8. Partisipasi yang baik pada Pemilihan Tahun 2020 walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19 (S8).</li> </ol>

## STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

### PELUANG

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasiujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

KPU Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan **kekuatan** dan memanfaatkan **peluang**, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Kalimantan Barat secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Kalimantan Barat.
4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
7. Menyelenggarakan pemantauan, *reviu*, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.
8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrase layanan (*hardware* dan *software*) KPU di Ibu Kota Negara baru.

**Tabel 50. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Kalimantan Barat**

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Masih terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</li> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</li> <li>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</li> <li>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</li> <li>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9).</li> <li>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</li> </ol>

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
<p><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1).</li> <li>Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2).</li> <li>Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> </ol>	<p>Mengatasi <b>kelemahan</b> guna mampu memanfaatkan <b>peluang</b> KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan.</li> <li>Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kalimantan Barat secara optimal.</li> <li>Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> </ol>

**Tabel 51. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Kalimantan Barat**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (S6).</li> <li>7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</li> <li>8. Partisipasi yang baik pada Pemilihan Tahun 2020 walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19 (S8).</li> </ol>

## STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN

### ANCAMAN

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kalimantan Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kalimantan Barat belum optimal mendukung Pemilu. 463 Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat belum memiliki akses internet (Berdasarkan Buku Provinsi Kalimantan Barat dalam angka yang dikeluarkan oleh BPS Kalimantan Barat Tahun 2021) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidat dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).

Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.
3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan.
6. Pendetayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.
11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).	12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
	14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

**Tabel 52. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Provinsi Kalimantan Barat**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Masih terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</li> </ol>

## STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</li> <li>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</li> <li>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</li> <li>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9).</li> <li>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</li> <li>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kalimantan Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kalimantan Barat belum optimal mendukung Pemilu. 463</li> </ol>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.</li> </ol>

### STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN

Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat belum memiliki akses internet (Berdasarkan Buku Provinsi Kalimantan Barat dalam angka yang dikeluarkan oleh BPS Kalimantan Barat Tahun 2021) (T4).	6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).	7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).	8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).	9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.
8. Biaya politik tinggi (T8).	10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).	11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).	
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).	
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesis, menjadi sebagai berikut :

**Tabel 53. Sintesa Strategi KPU Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024**

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun	1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU Provinsi Kalimantan Barat

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>setelah Pemilu dan Pemilihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga dengan pemerintah daerah untuk Pemilihan.</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>e. Menyelenggarakan pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat secara berkesinambungan.</li> <li>f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan Keputusan yang ditetapkan untuk Pemilihan.</li> <li>g. Menyusun SOP di semua bagian.</li> <li>h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.</li> <li>j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</li> <li>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Kalimantan Barat secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Provinsi Kalimantan Barat</li> </ul>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kalimantan Barat secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Provinsi Kalimantan Barat</p>
<p>a. Penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan dasar hukum yang kuat.</p>
<p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>c. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>d. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 atau disebut "Manifestasi Politik" yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Provinsi Kalimantan Barat;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Provinsi Kalimantan Barat;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## BAB 2

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan Rencana strategis 2020-2024 bahwa Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak

memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

## **A. VISI KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Visi KPU yaitu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Adapun visi KPU periode 2020-2024 adalah:

### **“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

## **B. MISI KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum 2020-2024, Misi KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. KPU sampai ke jajaran kebawah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu dan Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, aksesibilitas, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.
7. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Barat periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Provinsi Kalimantan Barat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilu dan Pemilihan.

## **C. TUJUAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Provinsi Kalimantan Barat, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, aksesibilitas, efisien, efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### **D. SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dengan adanya tujuan diatas, sasaran strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas”**, yaitu :
  - a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Kalimantan Barat yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, aksesibilitas, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu :
  - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu :
  - a. Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

## **BAB 3**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024**

Arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Strategis 2020-2024 KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat seperti diuraikan pada Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat.

### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

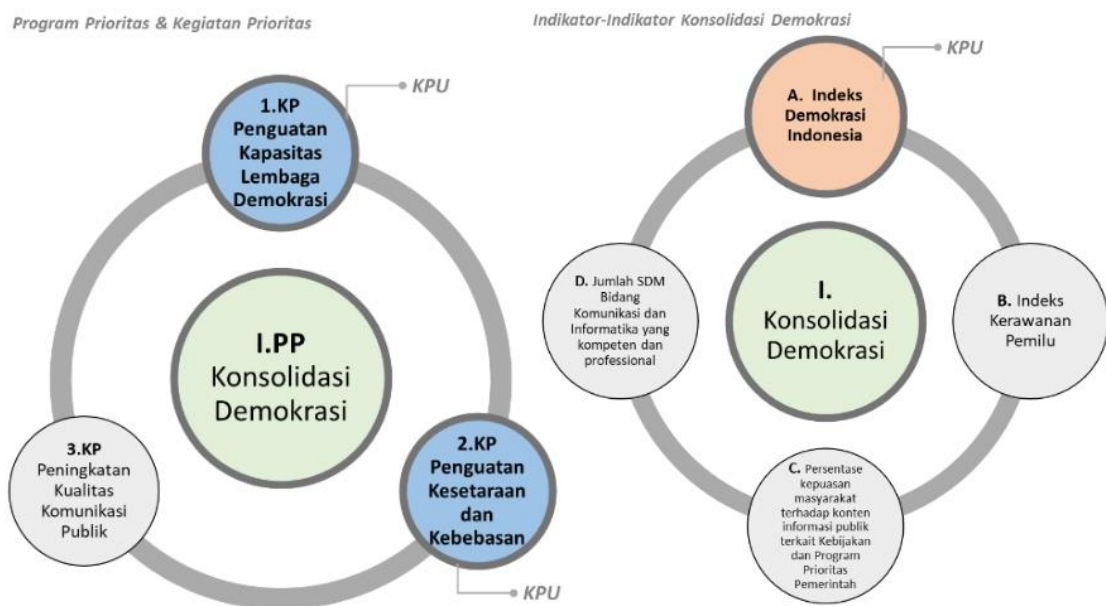
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, **“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”**, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - c. Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Setelah pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPTJM 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah ini :

**Gambar 4. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)**



Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu surat kabar lokal;
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
3. *Focus Group Discussion* (FGD), dan
4. Wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu:

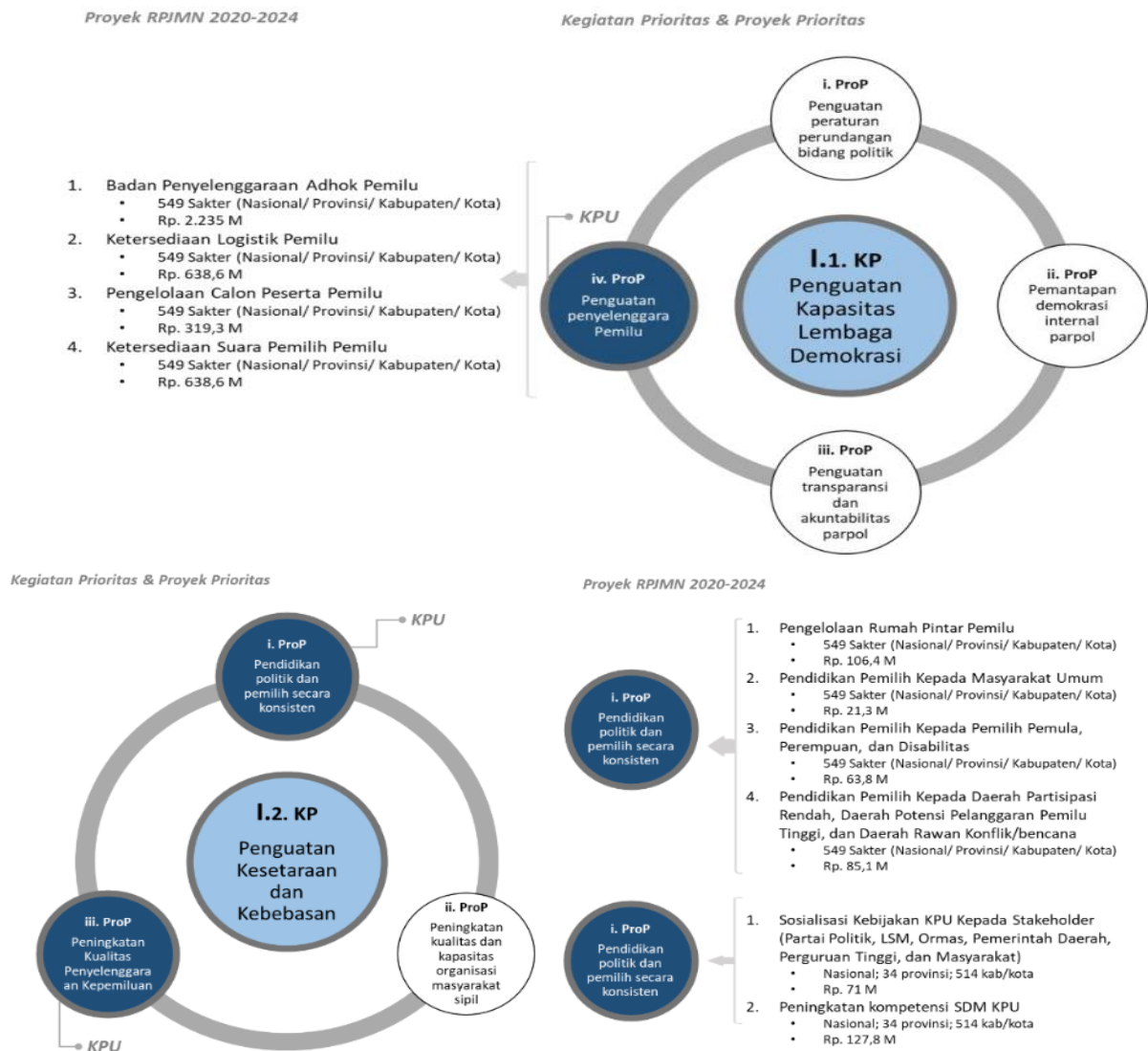
1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.
















Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar dibawah ini.

**Gambar 5. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Renstra KPU Tahun 2020-2024**



IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017-2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 6. Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) Tahun 2020-2024**

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1  Konsolidasi Demokrasi	 Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1  Penataan Lembaga Demokrasi	 Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2  Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	 Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	 Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	 Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3  Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	 Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	 Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

## B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada visi, misi tujuan dan sasaran strategis KPU yang kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan di tingkat Provinsi. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni :

## **1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:**

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
- c. Melaksanakan SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Melakukan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Melakukan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi ;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi;
- i. Melaksanakan Monitoring, supervisi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- k. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Provinsi; dan
- l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi secara optimal.

## **2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:**

- a. Melaksanakan dan menyelenggarakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Provinsi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih dan pemutakhiran Data Pemilih yang berkelanjutan.

### **C. KERANGKA REGULASI KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Dalam Kerangka penyusunan Regulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat adalah pelaksana dari peraturan KPU. Dalam kewenangannya KPU Provinsi Kalimantan Barat berwenang menetapkan Keputusan berupa Pedoman Teknis di setiap tahapan dan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi.

### **D. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Kerangka kelembagaan KPU Provinsi Kalimantan Barat merujuk pada kerangka kelembagaan KPU yang tertuang juga dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. KPU Provinsi Kalimantan Barat ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Lembaga-Lembaga di Kalimantan Barat yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan adalah :

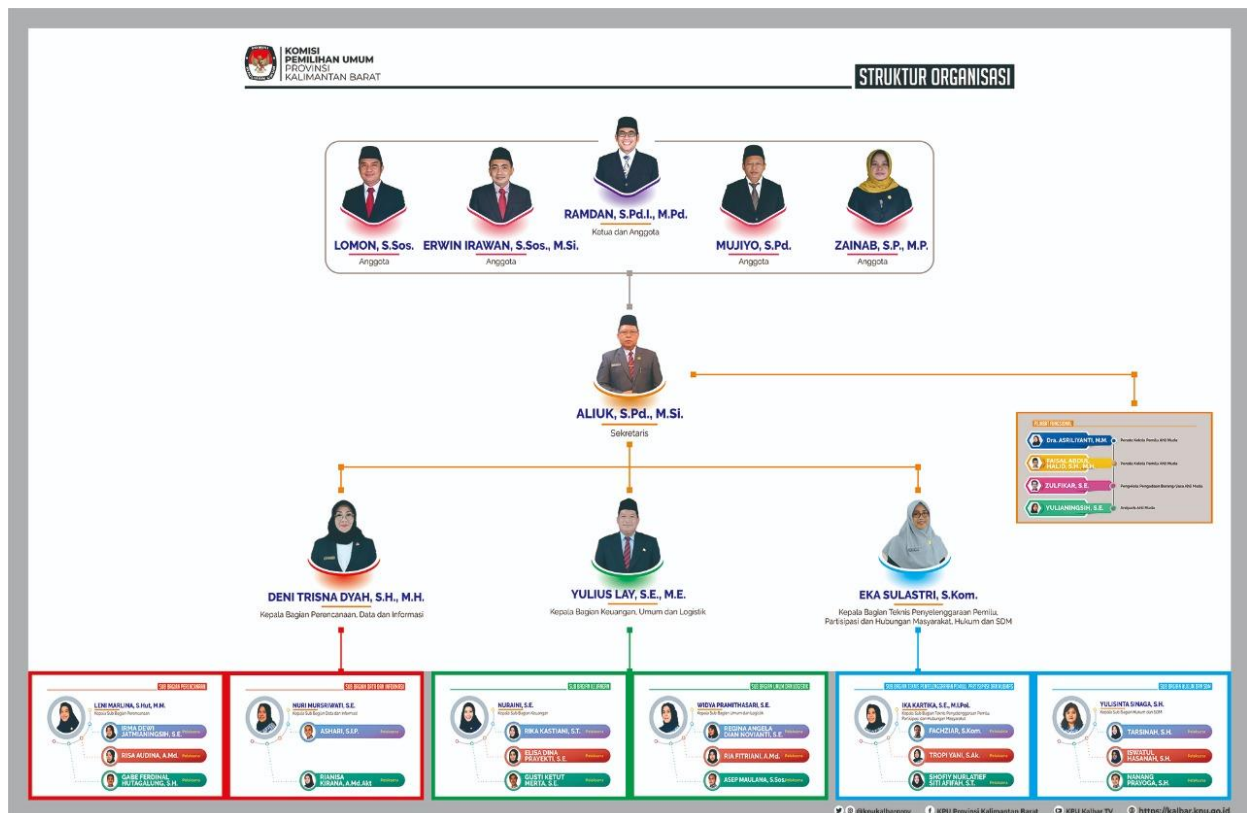
1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
4. Kodam XII Tanjungpura;
5. Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat;
6. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat;
7. Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Barat;
8. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
9. Lembaga atau Instansi terkait lainnya.

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang sifatnya hierarkis di setiap tingkatan dan bersifat tetap. Sehingga KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilaksanakan secara berkesinambungan bebas dari pengaruh pihak manapun. Secara kesekretariatan, KPU Provinsi Kalimantan Barat masuk ke dalam tipologi B, hal ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Penentuan tipologi ini didasarkan pada hasil penilaian beban kerja di masing-masing wilayah provinsi, kebutuhan kelembagaan KPU untuk menyesuaikan dengan sistem pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu dan/atau pemekaran atau penggabungan daerah provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan kecamatan.

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan tipologi B, terdiri atas :

1. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia;
3. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional (JF).

**Gambar 7. Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Barat**



## BAB 4

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024

Dalam rangka mendukung kebijakan dan strategi yang telah diuraikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat pada Bab sebelumnya, maka perlu ditetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2020-2024. Target kinerja ini juga harus didukung dengan kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan.

### A. TARGET KINERJA KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja dari sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat ini dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 54. Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2024**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Kalimantan Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	90	90	90	90
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di wilayah Kalimantan Barat	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Barat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	-	-	-	77.5%

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	-	-	-	0.16%
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kalimantan Barat sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	100%	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih Pemilu/Pemilihan sesuai dengan SIDALIH	-	-	-	100%	100%
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di wilayah Kalimantan Barat	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kalimantan Barat	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Kalimantan Barat	100%	-	100%	100%	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Program, Sasaran Program dan Indikator KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2020 - 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 55. Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024**

No.	Nama Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Dukungan Manajemen Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten di KPU Provinsi Kalimantan Barat	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi Penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Barat	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B	B	B	B	B
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan di Kalimantan Barat	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	-	-
		Terwujudnya Data Pemilih yang komprehensif, akurat dan terkini di Kalimantan Barat	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih Pemilu/Pemilihan sesuai dengan SIDALIH	-	-	-	100%	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu	-	-	-	90%	90%

No.	Nama Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kalimantan Barat	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh KPU Provinsi	100 %	-	-	100 %	100 %
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal di Kalimantan Barat	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal	100 %	-	100 %	100 %	100 %

Target Kinerja dari Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam Tahun 2020 - 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 56. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2024**

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen								
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah fasilitasi kerjasama KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Konsep analisis dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran KPU Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	1 Lap	1 Lap
			Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat	75%	75%	75%	75%	75%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	75%	75%	75%	75%	75%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang ditunjuk sebagai <i>pilot project</i> yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai <i>pilot project</i> pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	-	-	100%	100%
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di KPU Provinsi Kalimantan Barat	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Provinsi Kalimantan Barat	90%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase terlaksananya seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	-	-	-	100%	100%
		Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Barat	Persentase badan adhoc yang dibentuk di KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	-	-	-	100%	100%
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	14 Lap	14 Lap	14 Lap	15 Lap	15 Lap

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terselesaikannya permasalahan permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	80%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Kalimantan Barat	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	95%	95%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan KPU Provinsi	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	65%	65%	70%	80%	80%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	65%	65%	70%	80%	80%
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	60%	60%	60%	80%	80%
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Provinsi	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian laporan SPIP KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke KPU	-	-	-	100%	100%
		Terlaksananya Pelaporan Harta Kekayaan (LHKPN dan LHKASN) Penyelenggara Negara dan/atau wajib lapor pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	Persentase penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN oleh Penyelenggara Negara dan/atau wajib lapor pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	-	-	-	100%	100%
		Terlaksananya pelaporan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	Persentase pelaporan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	-	-	-	100%	100%
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	90%	90%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	60%	60%	70%	70%	70%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	60%	60%	60%
6.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM pada KPU Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Provinsi Kalimantan Barat	100%	100%	100%	100%	100%
<b>II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>								
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat	90%	92%	93%	95%	100%
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum di KPU Provinsi Kalimantan Barat	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat	7 perkara	6 perkara	5 perkara	4 perkara	3 perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	3 perkara	-	-	-	2 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Kalimantan Barat	88%	88%	89%	89%	90%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	-	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	-
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi	-	-	-	1 Satker	-
4.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 5 media massa	50%	-	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi	95%	95%	95%	95%	95%
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Provinsi	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	-	-
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih Pemilu/Pemilihan sesuai dengan SIDALIH	-	-	-	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Provinsi dalam kondisi baik	100%	100%	100%	90%	90%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Provinsi	50%	50%	65%	80%	90%

## B. KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Target total pendanaan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 17,671,938,000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 409,926,571,550,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 57. Kerangka Pendanaan Program Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (dalam rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>076.01.01</b>	Sasaran Program Dukungan Manajemen	6.620.555.000	6.889.033.000	9.175.077.000	8,835,969,000	8,835,969,000	<b>17,671,938,000</b>
<b>076.01.06</b>	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	851.841.000	260.557.000	9.457.968.000	60,766,626,000	349,159,945,550	<b>409,926,571,550</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.472.396.000</b>	<b>7.149.590.000</b>	<b>18.633.045.000</b>	<b>69,602,595,000</b>	<b>357,995,914,550</b>	<b>427,598,509,550</b>

## BAB 5

# PENUTUP

Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Provinsi Kalimantan Barat tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh undang-undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja unit kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan demikian, dokumen Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 merupakan pedoman untuk ditindaklanjuti menyusun Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi unit kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat diselesaikan.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja, dan penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

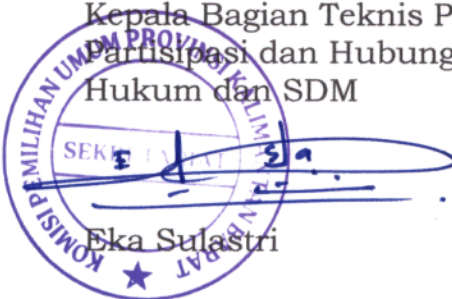
Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM



Eka Sulastri

